



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERUYAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN

TAHUN 2023



DINAS SOSIAL
KABUPATEN SERUYAN



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023**

**DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2024**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahun 2023 diwarnai agenda penambahan anggaran, refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Perberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Sosial berupa bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *inflasi kenaikan harga BBM*. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, Dinas Sosial Kabupaten Seruyan tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kuala Pembuang, 26 Februari 2024
Kepala Dinas Sosial,



ANGGA, SE

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19680405 198703 1 001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Dinas Sosial	1
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Biro Organisasi Kabupaten Seruyan	2
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	3
1.3.1 Kedudukan Organisasi	4
1.3.1 Struktur Organisasi	4
1.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial	4
1.4 Isu-isu Strategis	6
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	7
1.5.1 Sumber Daya Manusia	7
1.5.1 Sarana Prasarana	9
1.5.3 Dukungan Anggaran	10
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2022	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial terhadap Visi dan Misi Kabupaten Seruyan	15
2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial	19
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan	20
2.4 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023	20
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	26
2.6 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2023	31
2.7 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	42
2.7.1 Produk Layanan Dinas Sosial	42
2.7.2 Kotak / Form Layanan dan Aduan, Website dan Media Sosial	42
2.7.3 Survei Kepuasan Masyarakat	44
2.7.4 Jaringan online Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) – Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)	45

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	47
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023	45
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2023.....	49
3.2.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023	50
3.2.2 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir	51
3.2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	51
3.2.2.1 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	52
3.2.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	56
3.2.4 Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi	57
3.2.5 Analisis Atas RB Tematik Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2023	57
3.2.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	62
3.2.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	63
3.2.8 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya / Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2023	64
3.2.9 Capaian Kinerja Pelayanan Sarana Sosial	69
3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2023	69
3.4. Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Sosial	75
BAB IV PENUTUP.....	82
4.1 Kesimpulan	82
4.2 Rekomendasi Peningkatan Kinerja.....	83

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2023*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun

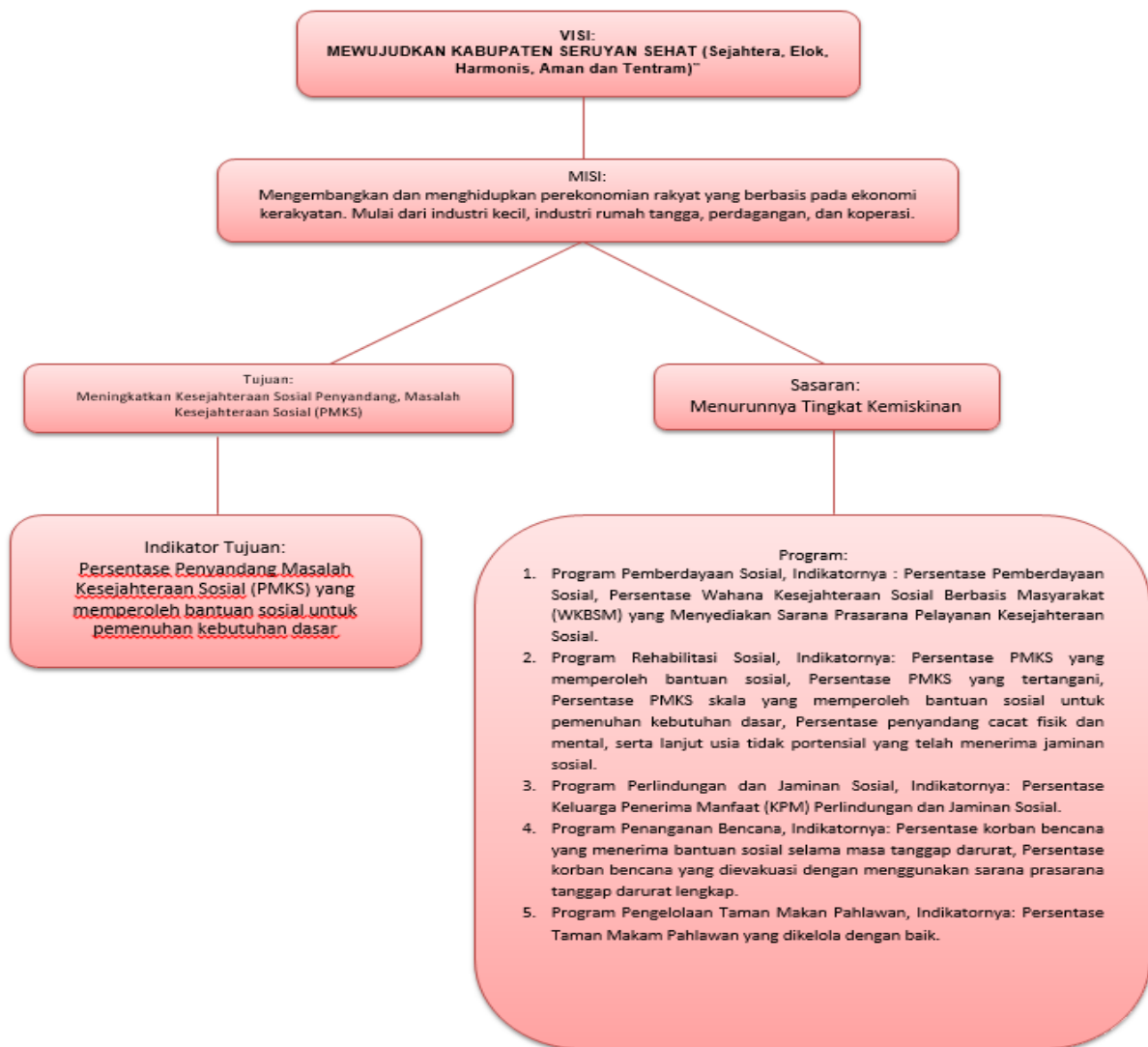
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 *Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Dinas Sosial*

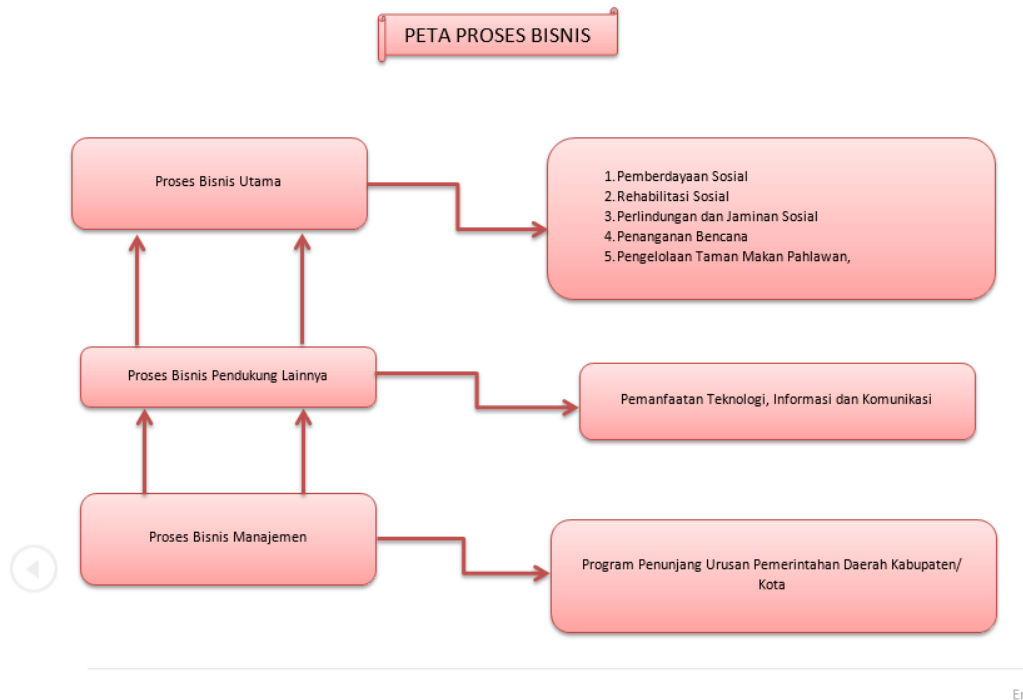
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, setiap Organisasi Perangkat Daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2018 – 2023. Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

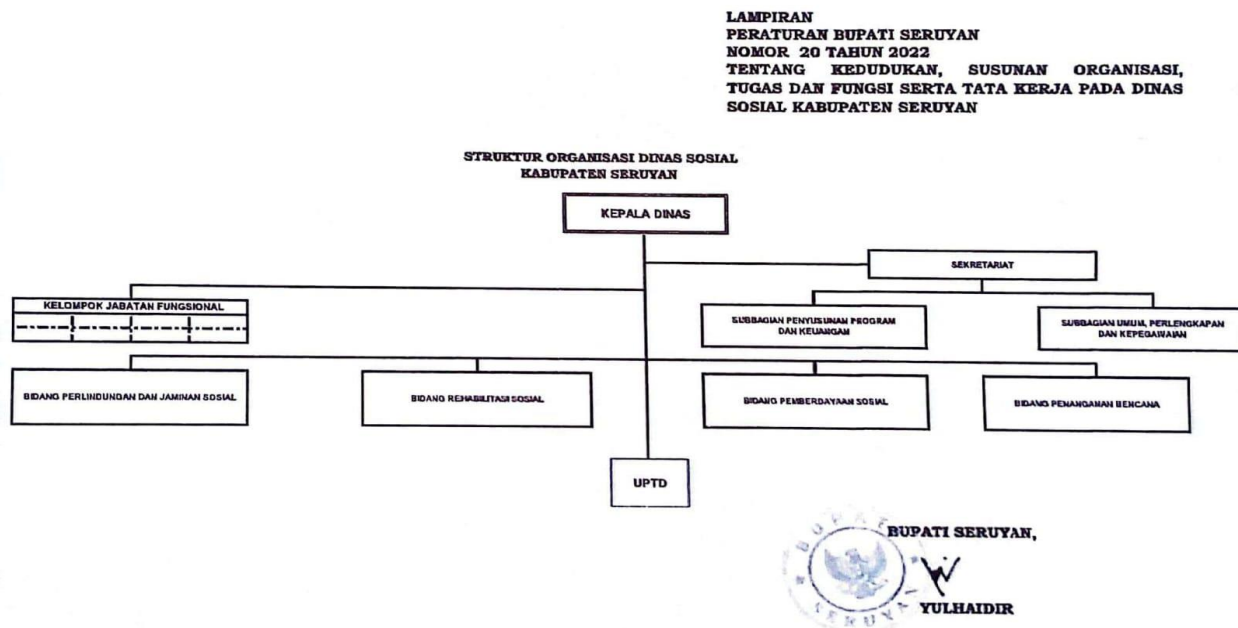
Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Sosial Kabupaten Seruyan



1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial



Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Sosial Kabupaten Seruyan memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana sebagai berikut :

1.3.1 Kedudukan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Seruyan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, Dinas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Sosial dengan tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial,
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial,
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- f. Bidang Penanganan Bencana
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Kelompok Jabatan Pelaksana

1.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- b. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- d. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari

- Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
- e. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - f. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - g. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - h. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - j. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - k. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Dinas Sosial dibagi habis ke dalam jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 8 tahun 2018 tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pembagian Tugas dan Fungsi ke dalam Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana

NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL / PELAKSANA	ABK	KELAS JABATAN
1	KEPALA DINAS	1	14
2	PEKERJA SOSIAL MADYA	1	11
3	PEKERJA SOSIAL MUDA	7	9
4	PEKERJA SOSIAL PERTAMA	1	8
5	PEKERJA SOSIAL PELAKSANA TERAMPIL	1	6
6	PEKERJA SOSIAL PELAKSANA PEMULA	1	5
7	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA	1	9
8	PERENCANA MADYA	1	11
9	PERENCANA MUDA	1	10
10	PERENCANA PERTAMA	1	8
11	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	1	7
12	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	1	6
13	SEKRETARIS	1	13
14	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	1	9
15	PENYUSUN PROGRAM DAN PELAPORAN	1	7
16	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	1	6
17	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	1	5
18	PENATA LAPORAN KEUANGAN	1	7
19	BENDAHARA	1	7
20	VERIFIKATOR KEUANGAN	1	6
21	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	1	5
22	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN	1	9
23	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	1	7
24	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	1	6

25	PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN	1	6
26	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	2	5
27	ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR	1	7
28	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	1	6
29	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	11
30	ANALIS PELAYANAN SOSIAL	1	7
31	ANALIS MASALAH SOSIAL	2	7
32	PENGELOLA DATA BANTUAN SOSIAL	2	6
33	PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	6
34	PENGADMINISTRASI UMUM	2	5
35	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL	1	11
36	ANALIS REHABILITASI MASALAH SOSIAL	1	7
37	PENGELOLA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DAN LANSIA	1	6
38	PENGELOLA REHABILITASI SOSIAL	1	6
39	PENGADMINISTRASI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG CACAT	1	5
40	PENGADMINISTRASI REHABILITASI MASALAH SOSIAL	2	5
41	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	11
42	ANALIS PELAYANAN SOSIAL	1	7
43	ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL	1	7
44	PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH	1	6
45	PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	6
46	PENGADMINISTRASI UMUM	1	5
47	KEPALA BIDANG PENANGANAN BENCANA	1	11
48	ANALIS PELAYANAN SOSIAL	2	7
49	PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH	1	6
50	PENGELOLA PERLINDUNGAN SOSIAL	1	6
51	PENGELOLA LOGISTIK	1	6
52	PENGADMINISTRASI UMUM	1	5

1.4. Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis Dinas Sosial dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagai peranan Dinas Sosial dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan sebagai salah satu andil Dinas Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Seruyan;
2. Melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIK-NG dan memvalidasi Basis Data Terpadu (BDT) dengan beberapa stakeholder terkait guna untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dijadikan data dasar dalam penanggulangan kemiskinan.
3. Peningkatan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial yang optimal sebagai antisipasi Peningkatan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Seruyan;
4. Penyempurnaan perencanaan dan penganggaran dalam mendukung pelaksanaan Program Kegiatan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial;
5. Perlunya Peningkatan kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan

SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Sosial dalam penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial sebagai bentuk dukungan keterlibatan dalam penyelenggaraan kegiatan sosial

6. Peningkatan Sistem Terpadu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan partisipasi dari semua pihak terkait (pemerintah, swasta dan masyarakat), yang diimbangi dengan peningkatan instrumen pendukung layanan;

1.5. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

1.5.1 Sumber Daya Manusia

Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Menurut jenis kelamin terdiri dari :
 - Laki-laki : 14 orang
 - Perempuan : 11 orang
2. Menurut golongan terdiri dari :
 - Golongan IV : 6 orang
 - Golongan III : 17 orang
 - Golongan II : 2 orang
3. Menurut eselon terdiri dari :
 - Eselon IV : 2 orang
 - Eselon III : 5 orang
 - Eselon II : 1 orang
4. Menurut pendidikan terdiri dari :
 - SLTA : 3 orang
 - D.III : 2 orang
 - S-1 : 14 orang
 - S-2 : 6 orang

Selain tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibantu dengan tenaga honorer/kontrak bidang administrasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang. Adapun keberadaan / eksisting Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Existing Pegawai Dinas Sosial

NO	NAMA JABATAN	STATUS ASN	
		PNS	HONORER
1	KEPALA DINAS	1	-
2	PEKERJA SOSIAL MADYA	-	-
3	PEKERJA SOSIAL MUDA	7	-
4	PEKERJA SOSIAL PERTAMA	-	-
5	PEKERJA SOSIAL PELAKSANA TERAMPIL	-	-
6	PEKERJA SOSIAL PELAKSANA PEMULA	1	-
7	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA	-	-

8	PERENCANA MADYA	-	-
9	PERENCANA MUDA	-	-
10	PERENCANA PERTAMA	-	-
11	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	-	-
12	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	1	-
13	SEKRETARIS	1	-
14	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	1	-
15	PENYUSUN PROGRAM DAN PELAPORAN	1	-
16	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	-	1
17	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	-	1
18	PENATA LAPORAN KEUANGAN	1	-
19	BENDAHARA	1	-
20	VERIFIKATOR KEUANGAN	-	-
21	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	-	1
22	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN	1	-
23	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	-	-
	ANALIS BARANG MILIK NEGARA	1	-
24	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	-	-
25	PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN	-	-
26	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	-	2
27	ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR	-	-
28	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	-	1
29	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	-
30	ANALIS PELAYANAN SOSIAL	-	-
31	ANALIS MASALAH SOSIAL	2	-
32	PENGELOLA DATA BANTUAN SOSIAL	-	1
33	PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	-	1
34	PENGADMINISTRASI UMUM	-	1
35	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL	1	-
36	ANALIS REHABILITASI MASALAH SOSIAL	-	1
37	PENGELOLA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DAN LANSIA	-	1
38	PENGELOLA REHABILITASI SOSIAL	-	1
39	PENGADMINISTRASI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG CACAT	-	1
40	PENGADMINISTRASI REHABILITASI MASALAH SOSIAL	-	2
41	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	-
42	ANALIS PELAYANAN SOSIAL	-	-
43	ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL	-	1
44	PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH	-	1
45	PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	-	1
46	PENGADMINISTRASI UMUM	-	1
47	KEPALA BIDANG PENANGANAN BENCANA	1	-
48	ANALIS PELAYANAN SOSIAL	2	-
49	PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH	-	1
50	PENGELOLA PERLINDUNGAN SOSIAL	-	1
51	PENGELOLA LOGISTIK	-	1
52	PENGADMINISTRASI UMUM	-	1
JUMLAH		25	23

Berdasarkan data dan tabel diatas, tingkat pendidikan SDM Dinas Sosial Kabupaten Seruyan relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 6 orang (10,71%), disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 14 orang (42,86%), D3 sebanyak 2 orang (7,14%), SLTA sebanyak 3 orang (39,29%).

Komposisi pegawai perempuan dan pegawai laki-laki seimbang, begitu pula untuk jabatan struktural hampir seimbang komposisinya antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

1.5.2 Sarana Prasarana

Dukungan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Sosial pada tahun 2023 berupa harta / asset yang dikelola untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Sarana Prasarana Dinas Sosial

No.	Klasifikasi	Nilai Aset Tetap
1	TANAH	287.994.500,00
	TANAH	287.994.500,00
2	PERALATAN DAN MESIN	2.817.777.580,00
	ALAT ANGKUTAN	1.483.626.600,00
	ALAT PERTANIAN	1.200.000,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	751.521.980,00
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	102.705.000,00
	ALAT LABORATORIUM	55.520.000,00
	KOMPUTER	423.204.000,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	5.710.789.250,00
	BANGUNAN GEDUNG	4.902.661.250,00
	MONUMEN	697.878.000,00
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	110.250.000,00
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	3.173.368.100,00
	JALAN DAN JEMBATAN	2.984.630.600,00
	BANGUNAN AIR	183.737.500,00
	INSTALASI	5.000.000,00
5	KOSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0
TOTAL		11.989.929.430,00

Secara rinci barang sarana prasarana milik Dinas Sosial yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial antara lain 3 (tiga) bidang tanah Taman Makam Pahlawan, Kendaraan operasional Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yakni 1 (satu) unit kendaraan roda empat (minibus) kendaraan dinas jabatan, 1 (satu) unit DUMLAP, 1 (satu) unit truk bak terbuka, 2 (dua) unit kendaraan operasional Reksi Cepat dan 10 (sepuluh) unit kendaraan roda dua. Kendaraan operasional Dinas Sosial sebagian besar adalah produksi tahun 2010, sehingga biaya pemeliharaan semakin besar tiap tahunnya. Kebutuhan ruangan kantor umum belum tersedia secara lengkap yakni ruang rapat, ruang mushola, ruang menyusui dan ruang arsip. Untuk ketersediaan ruangan kerja masih belum mencukupi. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filing cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran, CCTV dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 2. Dengan demikian

ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai. Terutama untuk personal computer, laptop dan ruang kerja kantor.

1.5.3 Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial kabupaten Seruyan berasal dari APBD Daerah kabupaten Seruyan. Untuk tahun 2023 dibanding tahun 2022 terdapat kenaikan anggaran belanja sebesar Rp 1.469.007.229,00 atau 19,57%. Rincian dukungan anggaran untuk Belanja Operasional dan Belanja Modal Dinas Sosial berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan 2022

KODE	URAIAN	2023	2022	TAMBAH / KURANG (Rp)
5	BELANJA DAERAH	8.976.436.679,00	7.507.429.450,00	1.469.007.229,00
5.1	BELANJA OPERASI	8.898.822.679,00	7.434.349.450,00	1.464.473.229,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.362.507.204,00	3.296.132.083,00	66.375.121,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.880.045.796,00	1.986.639.298,00	-106.593.502,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.341.554.408,00	1.254.652.785,00	86.901.623,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	140.907.000,00	54.840.000,00	86.067.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.434.429.475,00	2.249.124.817,00	1.185.304.658,00
5.1.02.01	Belanja Barang	651.515.500,00	735.909.500,00	-84.394.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	641.254.172,00	514.972.687,00	126.281.485,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	138.249.250,00	137.392.000,00	857.250,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.003.410.553,00	860.850.630,00	1.142.559.923,00
5.1.05	Belanja Hibah	216.991.000,00	174.029.500,00	42.961.500,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	216.991.000,00	174.029.500,00	42.961.500,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.884.895.000,00	1.715.063.050,00	169.831.950,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.884.895.000,00	1.715.063.050,00	169.831.950,00
5.2	BELANJA MODAL	77.614.000,00	73.080.000,00	4.534.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.614.000,00	73.080.000,00	4.534.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	61.114.000,00	0,00	61.114.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	16.500.000,00	73.080.000,00	-56.580.000,00
JUMLAH		8.976.436.679,00	7.507.429.450,00	1.469.007.229,00

Kenaikan dukungan anggaran pada tahun 2023 yang terjadi pada perubahan anggaran Tahun 2022 lebih banyak dimanfaatkan untuk Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan kepada kelembagaan dan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat

sebagai tindak lanjut mengatasi dampak inflasi akibat kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak(BBM), serta peningkatan prasarana perkantoran dalam menunjang pelayanan sosial.

1.6 Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022

Berdasarkan hasil penilaian Laporan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2022, masih banyak ditemukan kekurangan dan catatan yang perlu diperbaiki, Adapun kelemahan dalam penyusunan, kualitas dan implementasi SAKIP tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 adalah :

No	Uraian	Catatan yang perlu diperbaiki	Ket
1	PERENCANAAN		
a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	Tidak ada catatan	
b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	- Indikator Kinerja belum memenuhi kriteria SMART	Rencana tindaklanjut sebelumnya akan dilakukan analisis indikator kinerja. Untuk tahun 2023 belum ditindaklanjuti.
c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	- SKP/IKI belum dibuat	Sudah ditindaklanjuti
2	PENGUKURAN KINERJA		
a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	- Belum memiliki pedoman pengukuran data kinerja	- Hanya ada SOP
b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	- Pengukuran Kinerja belum dilakukan secara berkala; - Belum ada monitoring; - Pengumpulan data dan Pengukuran data kinerja belum memanfaatkan teknologi	- Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berkala; - Pengumpulan dan Pengukuran data kinerja dengan memanfaatkan teknologi belum ditindaklanjuti
c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	- Pengukuran kinerja belum menjadi dasar penempatan jabatan; - Belum ada kepedulian dari seluruh pegawai atau unit kerja atas capaian kinerja unit	- Pengukuran kinerja telah menjadi dasar penempatan jabatan; - Kepedulian unit kerja dan seluruh pegawai belum ditindaklanjuti

3	PELAPORAN KINERJA		
a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kinerja belum disusun secara berkala - Laporan kinerja belum pernah direviu 	Sudah ditindaklanjuti
b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi 	Belum ditindaklanjuti
	perbaikan/penyempurnaannya	<ul style="list-style-type: none"> kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) - Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas Sumber Daya 	
c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kinerja belum menjadi prioritas bagi pimpinan; - Laporan yang disusun belum di sosialisasikan kepada seluruh pegawai, sehingga tidak ada kepedulian dari pegawai; - Laporan kinerja belum dibuat secara berkala; - Laporan kinerja yang disusun belum mampu merubah budaya kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kinerja belum menjadi prioritas bagi pimpinan sudah ditindaklanjuti; - Sosialisasi kepada seluruh pegawai belum ditindaklanjuti; - Laporan kinerja berkala sudah ditindaklanjuti; - Laporan kinerja sudah mampu merubah budaya kerja

4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		
a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum pernah melakukan evaluasi internal; - Belum dilakukan evaluasi berjenjang 	Sudah ditindaklanjuti
b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada bukti evaluasi internal dari OPD 	Belum ditindaklanjuti seluruhnya
c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi dari APIP atas evaluasi tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti seluruhnya. 	Belum seluruhnya ditindaklanjuti

Rekomendasi perbaikan SAKIP dari hasil LHE SAKIP Dinas Sosial akan segera ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan konsultasi dan koordinasi dengan APIP dan BAPPEDA yang menjadi leading sektor perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Serta melakukan tindak lanjut dengan memperbaiki :

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Melakukan reuiu dokumen perencanaan / menganalisis capaian kinerja
 - b. Memperbaiki indikator kinerja yang belum SMART
 - c. Menyajikan hubungan antar bidang terkait kinerja dan anggaran dalam dokumen perencanaan
2. Pelaksanaan Kinerja
 - a. Melakukan monitoring pencapaian kinerja yang disajikan dalam pelaporan secara formal perbulan / pertriwulan
 - b. Membahas pengukuran kinerja pada bidang dengan melibatkan seluruh pegawai yang ada
 - c. Memaksimalkan teknologi atas pengumpulan dan pengukuran data kinerja dengan penggunaan aplikasi offline maupun online.
3. Pelaporan Kinerja
 - a. Menyampaikan laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah tepat waktu
 - b. Menyusun laporan kinerja sesuai standar Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014
 - c. Melampirkan data dukung pada dokumen Laporan Kinerja
 - d. Membahas capaian kinerja program kegiatan pada bidang-bidang teknis dengan melibatkan seluruh pegawai yang ada
4. Evaluasi Kinerja
 - a. Meningkatkan kualitas SDM terkait SAKIP dengan mengikuti Diklat / Bimtek / Webinar

- b. Mengoptimalkan penggunaan teknologi aplikasi dalam melakukan evaluasi internal

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Tugas dan Fungsi Dinas Sosial terhadap Visi dan Misi Kabupaten Seruyan*
2. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial*
3. *Strategi dan Arah Kebijakan*
4. *Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023*
5. *Perjanjian Kinerja Tahun 2023*
6. *Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2023*
7. *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD*

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2023 diwarnai agenda refocusing anggaran dan penambahan anggaran untuk optimalisasi Pemberdayaan Sosial dan penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada program Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Refocusing juga dipengaruhi oleh permasalahan inflasi daerah, tingginya harga pangan merupakan salah satu pemicu dalam inflasi di Kabupaten Seruyan. Selain itu, kenaikan harga BBM pun menjadi salah satu faktor inflasi yang berpengaruh cukup besar.

Masih belum optimalnya pemberdayaan sosial dan kualitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang masih belum maksimal melatar belakangi refocusing / realokasi dan penambahan anggaran pada OPD Dinas Sosial. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, Dinas Sosial Kabupaten Seruyan tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yang merupakan penjabaran operasional Perubahan RPJMD 2018 - 2023 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2018 – 2023. Perubahan Renstra ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023.

2.1. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial terhadap Visi dan Misi Kabupaten Seruyan

Visi Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 adalah :

“MEWUJUDKAN KABUPATEN SERUYAN SEHAT (Sejahtera, Elok, Harmonis, Aman dan Tentram)”

Sejahtera dapat diartikan sebagai suatu keadaan aman sentosa dan makmur. Suatu keadaan sejahtera tersusun dari tiga unsur, yakni pertama adalah seluruh permasalahan sosial dapat dikendalikan dengan baik, kedua segala macam kebutuhan hidup dapat terpenuhi, dan yang ketiga adalah tersedianya seluruh kesempatan bagi siapapun untuk dapat maju kearah yang lebih baik.

Konsep **sejahtera** sangat erat sekali dengan bentuk kesejahteraan sosial yang dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisir bagi peningkatan kesejahteraan sosial melalui kegiatan menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu, standar hidup, dan hubungan sosial.

Elok dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik, cantik, dan enak dipandang. Dalam hal ini elok juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu kondisi masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang baik dan jauh dari kegiatan-kegiatan negatif.

Harmonis dapat diartikan sebagai suatu kondisi bersangkut paut dengan harmoni yang seiya sekata. Harmonis dalam kehidupan merupakan suatu keadaan dimana setiap orang dapat saling merangkul bersama di setiap masalah sehingga terjadi keselarasan hidup guna mencapai kebahagiaan bersama.

Aman dalam hal ini mencerminkan suatu kondisi yang bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindungi dan tidak mengandung resiko. Aman juga merupakan kondisi dimana kita bisa mengidentifikasi resiko yang ada dan mengurangi resiko seminimal mungkin ke level yang bisa diterima dengan baik. Tentram dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang tidak merasa takut bahkan khawatir.

Tentram juga dapat dilihat sebagai sesuatu yang aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan). Di daerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran).

Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023, maka misi pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik serta profesional.

- Pemerintah Kabupaten Seruyan bertekad untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Hal ini dibarengi dengan peningkatan pelayanan publik yang prima dan profesional. Dalam pelaksanaannya, dilakukan upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan yang terpadu, serta peningkatan kinerja aparatur sipil negara.
2. Mewujudkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas, baik pendidikan formal maupun non formal. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Seruyan. Dalam mewujudkan SDM yang andal, perlu dibekali dengan pendidikan yang bermutu. Pelayanan Pendidikan diarahkan untuk melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) kewenangan kabupaten bagi seluruh masyarakat yang berhak.
 3. Memberikan pelayanan kesehatan yang prima serta berkualitas kepada masyarakat. Selain Pendidikan, pembangunan SDM Seruyan juga diarahkan untuk pemenuhan SPM kesehatan. Kebijakan pembangunan difokuskan bagi pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau seluruh daerah, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
 4. Mengembangkan dan menghidupkan perekonomian rakyat yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Mulai dari industri kecil, industri rumah tangga, perdagangan, dan koperasi. Peningkatan perekonomian masyarakat diarahkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Pengembangan agroindustri serta peningkatan kinerja kelembagaan dan kelompok usaha masyarakat dan koperasi diarahkan untuk meningkatkan perekonomian wilayah dan memperkuat perekonomian masyarakat. Dengan demikian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan pendapatan, yang pada gilirannya dapat mengendalikan tingkat kemiskinan dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.
 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Pembangunan Seruyan didukung dengan infrastruktur yang berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah secara proporsional. Infrastruktur wilayah menjadi pendukung berbagai aktivitas pembangunan dan menunjang pelayanan publik kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan transportasi, air bersih, sanitasi dan berbagai infrastruktur wilayah lainnya, diharapkan dapat memenuhi SPM dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
 6. Mewujudkan Pelabuhan Laut Teluk Segintung sebagai pintu gerbang ekonomi Kabupaten Seruyan. Konektivitas daerah menjadi hal yang penting dalam meningkatkan aksesibilitas. Kemajuan sebuah wilayah salah satunya diukur dari konektivitas dan

- aksesibilitas. Dengan pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, diharapkan dapat meningkatkan distribusi barang, orang dan jasa.
7. Meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan potensi sumber daya alam, pertanian, peternakan, kelautan, perkebunan, dan kehutanan. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan komitmen bersama seluruh masyarakat Indonesia. Dengan kekayaan alam yang berlimpah dan beragam, tidak membuat masyarakat serta merta melakukan pemanfaatan tanpa mengindahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijak untuk meningkatnya kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap perekonomian daerah. Selain itu, pengembangan pertanian dalam arti luas juga diarahkan untuk ketahanan pangan daerah.
 8. Mengembangkan sektor pariwisata, seni dan budaya. Pengembangan sektor unggulan pariwisata sebagai penggerak perekonomian diarahkan untuk meningkatkan daya saing pariwisata khususnya yang berbasis seni dan budaya. Peningkatan daya saing pariwisata diharapkan dapat menarik kunjungan wisatawan yang meningkat dari tahun ke tahun.
 9. Menciptakan lapangan pekerjaan, serta menjamin hak tenaga kerja. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, maka dibutuhkan sumber penghidupan yang baik. Angkatan kerja yang memiliki pekerjaan, merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Masalah ketenagakerjaan dan pengangguran merupakan hal yang sangat penting dan membutuhkan penanganan yang terpadu. Upaya meningkatkan kesempatan kerja yang menunjang produktivitas angkatan kerja diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.
 10. Menciptakan rasa aman, kehidupan yang damai, rukun, harmonis, agamis dan tentram dalam bingkai NKRI. Aktivitas masyarakat dan pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan lancar bila didukung oleh adanya kondisi daerah yang aman, tentram dan harmonis. Kondisi yang aman, tentram dan harmonis ini juga ditandai dengan terjaganya kualitas kehidupan beragama. Guna menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan serta kerukunan umat beragama, maka peran serta seluruh pelaku pembangunan sangat dibutuhkan.

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan

tugas pokok tersebut Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- b) Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- d) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
- e) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- f) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
- g) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
- h) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- i) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- j) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
- k) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih secara keseluruhan adalah untuk mewujudkan Kabupaten Seruyan yang Sejahtera. Walaupun di dalam penjabaran misi secara spesifik tidak dijabarkan misi yang di emban oleh Dinas Sosial, namun secara umum tugas dan fungsi Dinas Sosial sebagai penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam program dan kegiatannya yang secara implisit merupakan kegiatan yang mengarah dan mendukung upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial di bidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Penanganan Bencana bagi seluruh masyarakat Kabupaten Seruyan

2.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Seruyan selama lima tahun adalah:

“Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”

Dengan indikator tujuan : Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Adapun sasaran Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, 2018-2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Jiwa	2.753	2.723	2.663	2.633	2.633	2.633

2.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan	Peningkatan sistem perlindungan sosial yang komperensif
			Pengembangan kapasitas keluarga dalam rangka kemandirian penduduk miskin dan rentan

2.4. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Sosial Kabupaten Seruyan tahun 2023 maupun program dan kegiatan pendukung mendapat anggaran murni sebesar Rp. 8,989,170,724,00 yang mendapat tambahan anggaran pada perubahan anggaran menjadi Rp. 9,189,170,724,00 sebagaimana tabel berikut:

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS SOSIAL TAHUN 2023

Tabel 2.3

Struktur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Tambah / Kurang	(%)	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Sebelu m	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebel um	Sesud ah	Sebelum	Sesudah			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												8.989.170.724	9.189.170.724	200.000.000	2,22
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												5.160.748.724	5.164.050.724	3.302.000	0,06
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												136.072.000	136.072.000	0	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Unit Kerja yang mendapat Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Laporan Perencanaan,Peng anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun tepat waktu	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	100 %	100 %	7 Laporan	7 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	126.072.000	126.072.000	0	0,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapat Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase Laporan Perencanaan,Peng anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun tepat waktu	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000	10.000.000	0	0,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												3.576.863.852	3.576.865.852	2.000	0,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Unit Kerja yang mendapat Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	100 %	100 %	30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	100 %	100 %	3.576.863.852	3.576.865.852	2.000	0,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												45.722.000	45.722.000	0	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Unit Kerja yang mendapat Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Penyedian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	100 %	100 %	32 Paket	32 Paket	1 Tahun	1 Tahun	27.000.000	27.000.000	0	0,00	
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Unit Kerja yang mendapat Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Penyedian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	100 %	100 %	1 Orang	1 Orang	1 Tahun	1 Tahun	4.870.000	4.870.000	0	0,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Unit Kerja yang mendapat Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Penyedian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	100 %	100 %	1 Orang	0 Orang	1 Tahun	1 Tahun	13.852.000	13.852.000	0	0,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah												498.972.750	498.972.750	0	0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Unit Kerja yang mendapat Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	1 %	1 %	9.606.000	9.606.000	0	0,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Unit Kerja yang mendapat Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	1 %	1 %	81.699.000	81.699.000	0	0,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Unit Kerja yang mendapat Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	1 %	1 %	18.653.250	18.653.250	0	0,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Unit Kerja yang mendapat Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	1 %	1 %	86.312.500	86.312.500	0	0,00	

				Pembuang II											
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS SOSIAL TAHUN 2023															
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Unit Kerja yang mendapat Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	1 %	1 %	44.996.000	44.996.000	0	0,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Unit Kerja yang mendapat Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	100 %	100 %	1406 Dokumen	1406 Dokumen	1 %	1 %	13.498.000	13.498.000	0	0,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Unit Kerja yang mendapat Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	100 %	100 %	50 Laporan	50 Laporan	1 %	1 %	244.208.000	244.208.000	0	0,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												19.172.000	19.172.000	0	0,00
Pengadaan Mebel	Persentase Unit Kerja yang mendapat Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	1 Tahun	1 Tahun	14.772.000	14.772.000	0	0,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Unit Kerja yang mendapat Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Tahun	1 Tahun	4.400.000	4.400.000	0	0,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												736.126.512	739.426.512	3.300.000	0,45
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Unit Kerja yang mendapat Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	850 Laporan	850 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	9.350.000	9.350.000	0	0,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Unit Kerja yang mendapat Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	90.743.000	90.743.000	0	0,00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Unit Kerja yang mendapat Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	25.310.000	25.310.000	0	0,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Unit Kerja yang mendapat Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	610.723.512	614.023.512	3.300.000	0,54	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												147.819.610	147.819.610	0	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Unit Kerja yang mendapat Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Waktu Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	1 Tahun	1 Tahun	100.965.850	100.965.850	0	0,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Unit Kerja yang mendapat Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Waktu Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	1 Tahun	1 Tahun	46.853.760	46.853.760	0	0,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL												282.146.000	382.146.000	100.000.000	35,44
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota												11.418.000	39.623.000	28.205.000	247,02
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase Pemberdayaan Sosial Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase Surat Rekomendasi Izin Undian gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 % 98 %	98 % 98 %	10 Dokumen	10 Dokumen	92 %	92 %	11.418.000	39.623.000	28.205.000	247,02	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota												270.728.000	342.523.000	71.795.000	26,52
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	Persentase Pemberdayaan Sosial Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	Persentase Pengembangan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan,	98 % 98 %	98 % 98 %	10 Orang	10 Orang	90 %	90 %	7.467.000	7.467.000	0	0,00	

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS SOSIAL TAHUN 2023

Kabupaten/Kota	(WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Daerah Kabupaten/ Kota	Semua Kelurahan										
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Sosial Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 % 98 %	98 % 98 %	10 Orang	10 Orang	90 %	90 %	11.316.000	11.316.000	0	0,00
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Sosial Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 % 98 %	98 % 98 %	2 Keluarga	2 Keluarga	90 %	90 %	8.727.000	8.727.000	0	0,00
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Sosial Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 % 98 %	98 % 98 %	7 Lembaga	7 Lembaga	90 %	90 %	213.776.000	285.571.000	71.795.000	33,58
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase Pemberdayaan Sosial Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 % 98 %	98 % 98 %	10 Sertifikat	10 Sertifikat	90 %	90 %	29.442.000	29.442.000	0	0,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											249.347.000	299.347.000	50.000.000	20,05
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial											224.347.000	249.347.000	25.000.000	11,14
Penyediaan Permakanan	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak portensial yang telah menerima jaminan sosial Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persentase PMKS yang tertangani	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 % 95 % 95 % 95 %	95 % 95 % 95 % 95 %	100 Orang	100 Orang	98 %	98 %	59.806.000	59.806.000	0	0,00
Penyediaan Sandang	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak portensial yang telah menerima jaminan sosial Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persentase PMKS yang tertangani	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 % 95 % 95 % 95 %	95 % 95 % 95 % 95 %	60 Orang	60 Orang	98 %	98 %	5.000.000	9.750.000	4.750.000	95,00
Penyediaan Alat Bantu	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak portensial yang telah menerima jaminan sosial Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persentase PMKS yang tertangani	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 % 95 % 95 % 95 %	95 % 95 % 95 % 95 %	26 Orang	26 Orang	98 %	98 %	29.875.000	29.875.000	0	0,00
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar	Kab. Seruyan, Semua	95 % 95 %	95 % 95 %	20 Orang	20 Orang	98 %	98 %	69.896.000	90.146.000	20.250.000	28,97

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS SOSIAL TAHUN 2023

	portensial yang telah menerima jaminan sosial Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persentase PMKS yang tertangani	Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.	Kecamatan, Semua Kelurahan	95 % 95 %	95 % 95 %								
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak portensial yang telah menerima jaminan sosial Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persentase PMKS yang tertangani	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 % 95 % 95 % 95 %	95 % 95 % 95 % 95 %	20 Orang	20 Orang	98 %	98 %	9.773.000	9.773.000	0	0,00
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak portensial yang telah menerima jaminan sosial Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persentase PMKS yang tertangani	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 % 95 % 95 % 95 %	95 % 95 % 95 % 95 %	2 Orang	2 Orang	98 %	98 %	49.997.000	49.997.000	0	0,00
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial											25.000.000	50.000.000	25.000.000	100,00
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak portensial yang telah menerima jaminan sosial Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persentase PMKS yang tertangani	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan kepada Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 % 95 % 95 % 95 %	95 % 95 % 95 % 95 %	50 Orang	50 Orang	100 %	100 %	25.000.000	50.000.000	25.000.000	100,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL											2.954.513.000	2.954.513.000	0	0,00
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											2.954.513.000	2.954.513.000	0	0,00
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Daerah Kabupaten	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	98 %	39906 Oran g	39906 Oran g	100 %	100 %	75.000.000	75.000.000	0	0,00
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Daerah Kabupaten	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	98 %	15411 Kelua rga	15411 Kelua rga	100 %	100 %	74.997.000	74.997.000	0	0,00
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Daerah Kabupaten	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	98 %	2315 Kelu ar ga	2315 Kelu ar ga	100 %	100 %	2.729.524.000	2.729.524.000	0	0,00
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Daerah Kabupaten	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	98 %	5000 Orang	5000 Orang	100 %	100 %	74.992.000	74.992.000	0	0,00

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS SOSIAL TAHUN 2023

PROGRAM PENANGANAN BENCANA											248.931.000	295.629.000	46.698.000	18,76
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota											165.920.000	197.618.000	31.698.000	19,10
Penyediaan Makanan	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan Sosial Kabupaten yang mendapatkan perlindungan	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 % 99 %	97 % 99 %	100 Orang	100 Orang	140 Orang	140 Orang	46.188.000	37.012.000	-9.176.000	-19,87
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan Sosial Kabupaten yang mendapatkan perlindungan	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 % 99 %	97 % 99 %	20 Orang	20 Orang	140 Orang	140 Orang	36.735.000	71.785.000	35.050.000	95,41
Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan Sosial Kabupaten yang mendapatkan perlindungan	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 % 99 %	97 % 99 %	20 Orang	20 Orang	140 Orang	140 Orang	82.997.000	88.821.000	5.824.000	7,02
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota											83.011.000	98.011.000	15.000.000	18,07
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang siap siaga Bencana	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 % 99 %	97 % 99 %	2 Kampung	2 Kampung	60 Orang	60 Orang	40.449.000	50.449.000	10.000.000	24,72
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Jumlah kegiatan Bhakti Sosial yang dilaksanakan Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang siap siaga Bencana	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 % 99 %	97 % 99 %	12 Kegiatan 68 Orang	12 Kegiatan 0 Orang 68 Orang	60 Orang	60 Orang	42.562.000	47.562.000	5.000.000	11,75
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN											93.485.000	93.485.000	0	0,00
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											93.485.000	93.485.000	0	0,00
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota yang Dikelola dengan baik	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	46.696.000	46.696.000	0	0,00
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota yang Dikelola dengan baik	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Makam	1 Makam	100 %	100 %	44.550.000	44.550.000	0	0,00
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota yang Dikelola dengan baik	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	2.239.000	2.239.000	0	0,00
											8.989.170.724	9.189.170.724	200.000.000	2,22

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perjanjian Kinerja antara Pejabat Esselon II, Pejabat Esselon III, dan Pejabat Esselon IV dengan Atasan Langsung sebagai bentuk kinerja pegawai yang berorientasi pada hasil demi terwujudnya manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Seruyan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2023

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	2.633 Jiwa	Pemberdayaan Sosial	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
						Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
							Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
							Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
							Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
					Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		
					Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
							Penyediaan Sandang
							Penyediaan Alat Bantu
							Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
						Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
						Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
					Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
							Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
							Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
					Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
							Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
							Pelayanan Dukungan Psikososial
						Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
					Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Esselon II Dinas Sosial Kabupaten Seruyan



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (ESELON 2)

- Unit** : Dinas Sosial
- Kerja**
- Jabatan** : Kepala Dinas Sosial
- Tugas** : memimpin, membina, merencanakan, mengoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan dibidang sosial serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.
- Fungsi** :
1. perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
 2. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
 3. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
 4. penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan;
 5. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.



No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran Strategis	Rumus Penghitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani	Σ Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani(x)	Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.



Kuala Pembuang, Januari 2022



Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19680405 198703 1 001

Pada tahun 2023, Dinas Sosial Kabupaten Seruyan melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Reviu dilakukan karena adanya penambahan anggaran dan refocusing / realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang Sosial, dengan ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023. Perjanjian Kinerja (Reviu) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada anggaran murni pagu anggaran untuk urusan sosial sebesar Rp. 8.989.170.724,00 dan terjadi pergeseran / realokasi anggaran pada perubahan anggaran menjadi Rp.9.189.170.724,00, bertambah sebesar Rp. 200.000.000,00 penambahan anggaran dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk upaya pengoptimalan pemberdayaan sosial dan peningkatan kualitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang masih belum maksimal.
2. Penguatan anggaran untuk peningkatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial di bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Penanganan Bencana, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
3. Penguatan anggaran untuk pencapaian 62 (enam puluh dua) indikator urusan Sosial pada Indikator Kinerja Urusan Daerah (IKUD) berdasarkan Rakortek pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi;
4. Peningkatan layanan publik terhadap masyarakat berupa :
 - a. Pembentukan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) bidang Sosial;
 - b. peningkatan kapasitas untuk kedaruratan bencana dan pemberian dukungan psikososial bagi korban bencana / kelompok rentan;
 - c. penanganan kedaruratan penyandang disabilitas mental dan reunifikasi keluarga bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar;
 - d. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Terintegrasi dan Fasilitasi penyaluran bantuan.
5. Peningkatan layanan administrasi berupa pembuatan Front Office layanan di lobby Dinas Sosial, pengadaan prasarana elektronik (Komputer dan printer) untuk pendukung Front Office.
6. Mengelola Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR) yang berfokus pada Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat kawasan pinggir hutan pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sub

kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga .

7. Pemberian Bantuan Sosial kepada Individu berupa barang / uang dan Pemberian Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bantuan Sosial kepada Individu berupa barang (Mixer / presto) yang diberi Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;
 - b. Bantuan Sosial kepada Individu berupa barang / Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. Bantuan Sosial kepada Individu berupa barang Paket Sembako untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia;
 - d. Bantuan Sosial kepada Individu berupa barang Paket Sembako kepada Veteran/Janda/Ahli Waris Veteran;
 - e. Bantuan Sosial kepada Individu berupa Uang Bantuan Langsung Tunai Sisa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) bagi masyarakat kawasan pinggir hutan;
 - f. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang diberikan kepada Karang Taruna Kabupaten Seruyan, Karang Taruna Kecamatan Seruyan Hilir Timur dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Seruyan.

2.6. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dalam menetapkan rencana Strategis, penyusunan rencana kinerja tahunan dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kerja, pengukuran kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, melakukan evaluasi capaian kinerja instansi pemerintah dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan

Tujuan	IKUTujuan	Rumusan	Target Tujuan	Sasaran	IKU Sasaran	Rumusan	Target Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh Bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	ΣPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh Bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	2.633 Jiwa	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani	ΣJumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani	2.633 Jiwa	PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	36.711.000,00
									Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	6.747.000,00
										Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	11.316.000,00
										Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8.007.000,00
										Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	292.975.500,00
										Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	28.197.000,00
								REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	59.806.000,00
										Penyediaan Sandang	1.100.000,00
										Penyediaan Alat Bantu	29.825.000,00
										Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	98.780.000,00
										Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	9.773.000,00

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS SOSIAL TAHUN 2023

									Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	49.997.000,00
								Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50.000.000,00
							PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	51.642.000,00
									Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	71.136.000,00
									Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.771.743.000,00
									Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	59.992.000,00
							PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Penyediaan Makanan	42.413.000,00
									Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	82.215.000,00
									Pelayanan Dukungan Psikososial	80.784.000,00
								Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	43.087.000,00
									Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	48.127.000,00
							PENGLOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	48.208.500,00
									Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	41.230.000,00
									Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2.239.000,00
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	141.327.000,00
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.786.800,00
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.265.531.122,00
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	37.500.000,00
									Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00
									Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32.470.000,00

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS SOSIAL TAHUN 2023

									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.481.000,00
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	167.905.000,00
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	53.082.250,00
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.110.000,00
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.917.000,00
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.498.000,00
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	380.576.000,00
									Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Mebel	30.569.000,00
									Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.650.000,00
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.100.000,00
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.473.300,00
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.510.000,00
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	585.775.512,00
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.477.100,00
									Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.380.640,00

Tabel 2.6
Cascading (Penjenjangan) Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumusan	Target Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Rumusan	Target Program	Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator Kegiatan	Rumusan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rumusan	Target Sub Kegiatan
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh Bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani	ΣJumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani	2.633 Jiwa	Pemberdayaan Sosial	Terlaksananya Pemberdayaan Sosial kewenangan Kabupaten /Kota	1. Persentase Pemberdayaan Sosial	ΣPemberdayaa n Sosial x 100%	98%	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang	ΣPenerbitan Rekomendasi Ijin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang / Usulan Rekomendasi Ijin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang x 100%	92%	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Σ Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpul an Uang atau Barang tahun n	10 Dokumen
								2. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	ΣWKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos / ΣWKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos skala Kabupaten/Kota x 100%	98%	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengembangan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	ΣPotensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Seruyan mendapatkan pengembangan potens / ΣPotensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten SeruyanX 100%	90%	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota a	Jumlah Tenaga Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota a yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota a	Σ Orang Mendapat Peningkata n Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota tahun n	10 Orang
																Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota a	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota a yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota a	Σ Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Kapasitasny a Kewenanga n Kabupaten/ Kota tahun n	10 Orang
																Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota a	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota a	Σ Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasny a Kewenanga n Kabupaten/ Kota tahun n	2 Keluarga
																Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota a	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota a	Σ SLembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasny a Kewenanga n Kabupaten/ Kota tahun n	7 Lembaga
																Peningkatan Kemampuan Sumber Daya	Meningkatnya Sumber Daya	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil	ΣSertifikat yang dari Hasil	10 Sertifikat

Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	
Penyediaan Permakanaan	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan permakanaan per orang sesuai standar gizi minimal bagi lanjut usia terlanter kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Σ Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
Penyediaan Sandang	Terlaksananya penyediaan sandang bagi anak terlanter diluar panti dalam 1 tahun nyang menjadi kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Σ Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang
Penyediaan Alat Bantu	Terlaksananya penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Σ Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlaksananya pelayanan orang yang mendapatkan reunifikasi keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Σ Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual bagi pelajar bukan korban	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Σ Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	50 Orang

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS SOSIAL TAHUN 2023

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

2.7. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

2.7.1 Produk Layanan Dinas Sosial

Dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan dukungan terhadap proses pencapaian Kinerja, Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mempunyai 6 list produk layanan yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik kinerja Dinas, yaitu sebagai berikut :

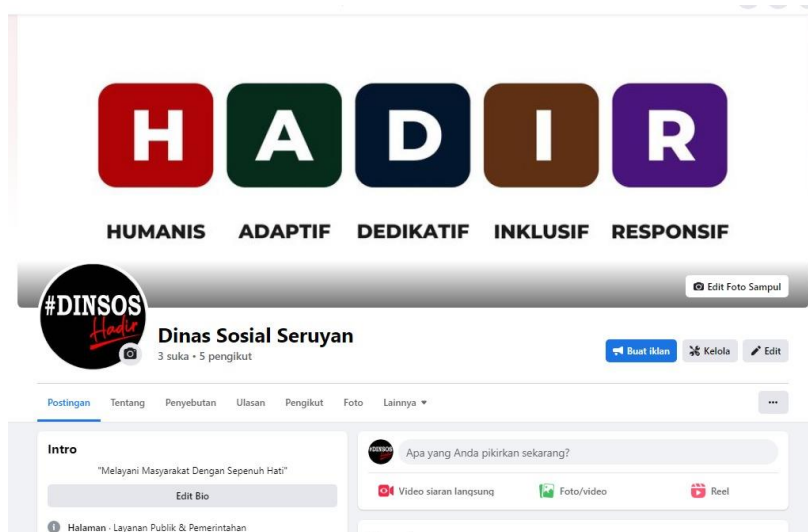
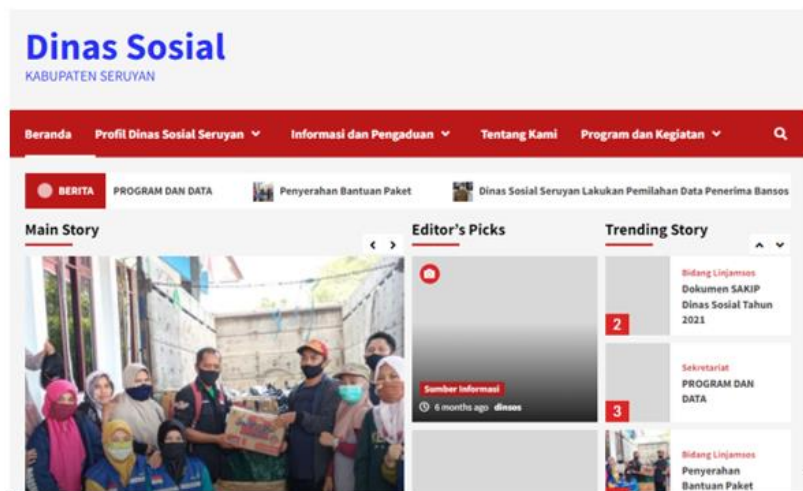
NO	PELAYANAN PUBLIK	PELAKSANA
1	Layanan Pengumpulan Sumbangan (PUB) Undian Gratis Berhadiah (UGB)	Bidang Pemberdayaan Sosial
2	Layanan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (LKS)	Bidang Pemberdayaan Sosial
3	Layanan Penyediaan Permakanan, Sandang Dan Alat Bantu Untuk PPKS	Bidang Rehabilitasi Sosial
4	Layanan Kedaruratan Rehabilitasi Sosial	Bidang Rehabilitasi Sosial
5	Layanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Program Keluarga Harapan Dan Program Sembako	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
6	Layanan Kedaruratan Dan Logistik Bencana	Bidang Penanganan Bencana

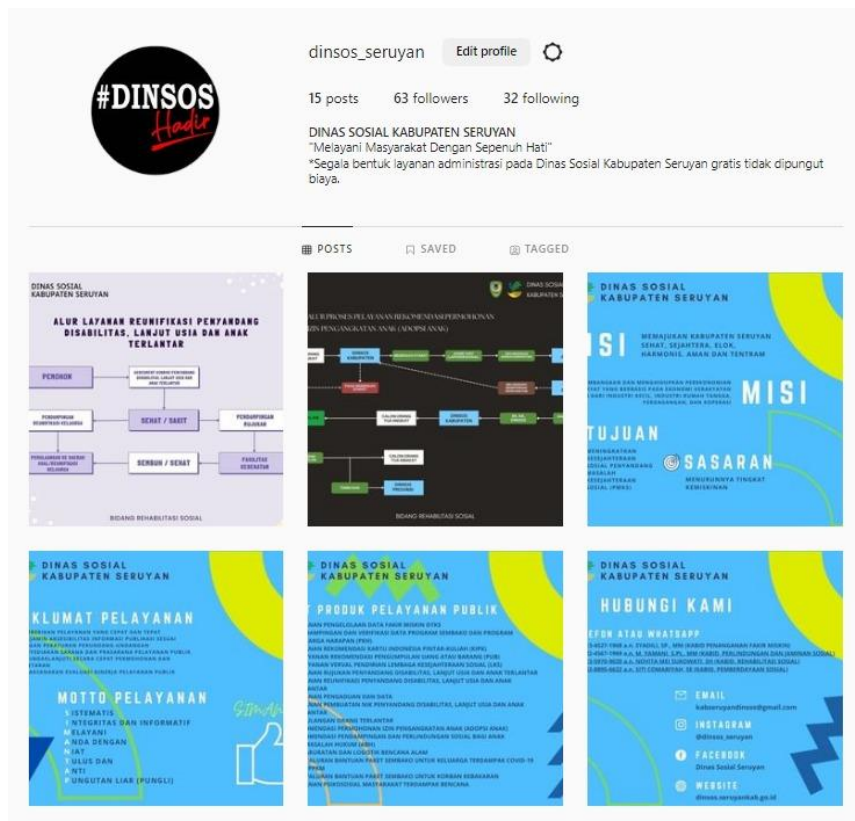
2.7.2 Kotak / form Layanan dan aduan, Website Dan Media Sosial

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada Website : <http://dinsos.seruyan@gmail.com>, Media Sosial Facebook Dinas Sosial Seruyan dan Media Sosial Instagram @dinsos_seruyan yang menyajikan informasi Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

Terdapat juga kotak layanan aduan dan form layanan aduan, serta layanan aduan online melalui website, facebook dan instagram Dinas Sosial yang diharapkan dapat menampung kebutuhan layanan atas masalah, aduan, kritis dan saran dari masyarakat dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial

Gambar 2.1
Website dan Media Sosial (Medsos) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan





2.7.3 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada awal tahun 2022 yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana masyarakat sebagai pengguna layanan merasa puas terhadap pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yang didapatkan, serta memperoleh rasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas. Disamping itu juga tujuan dari Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan urusan sosial.

Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan Dinas Sosial
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Dinas Sosial
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik Dinas Sosial

2.7.4 Jaringan online Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) – Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)

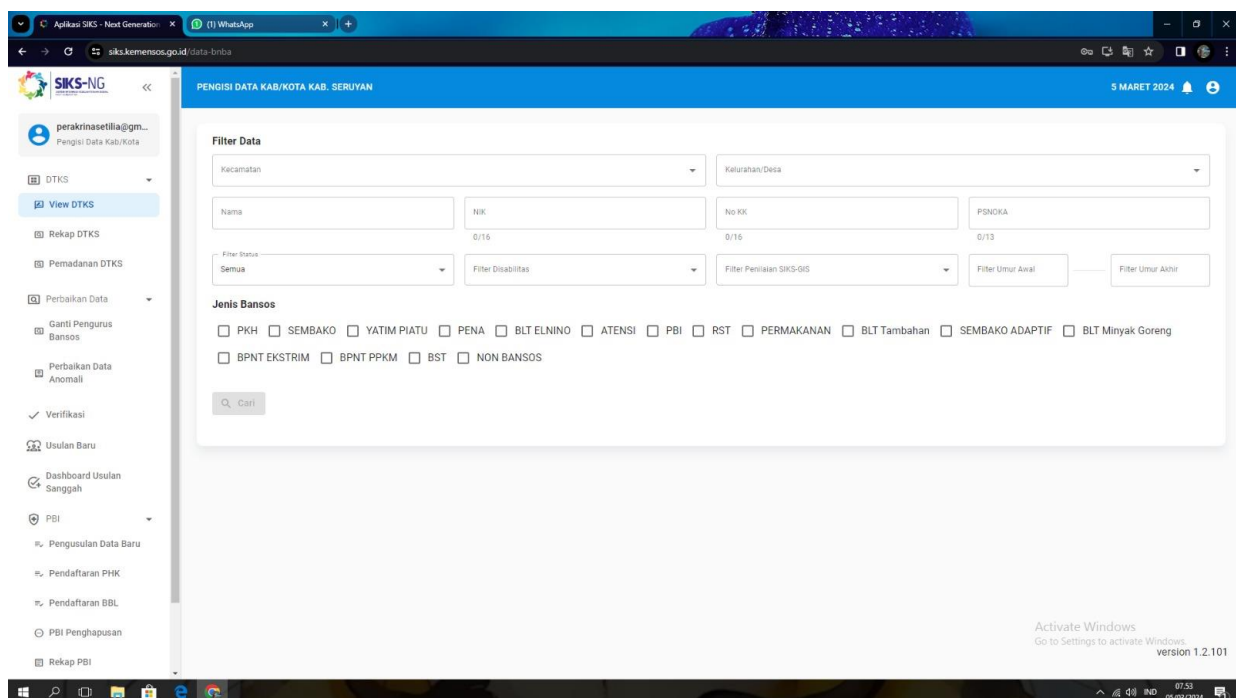
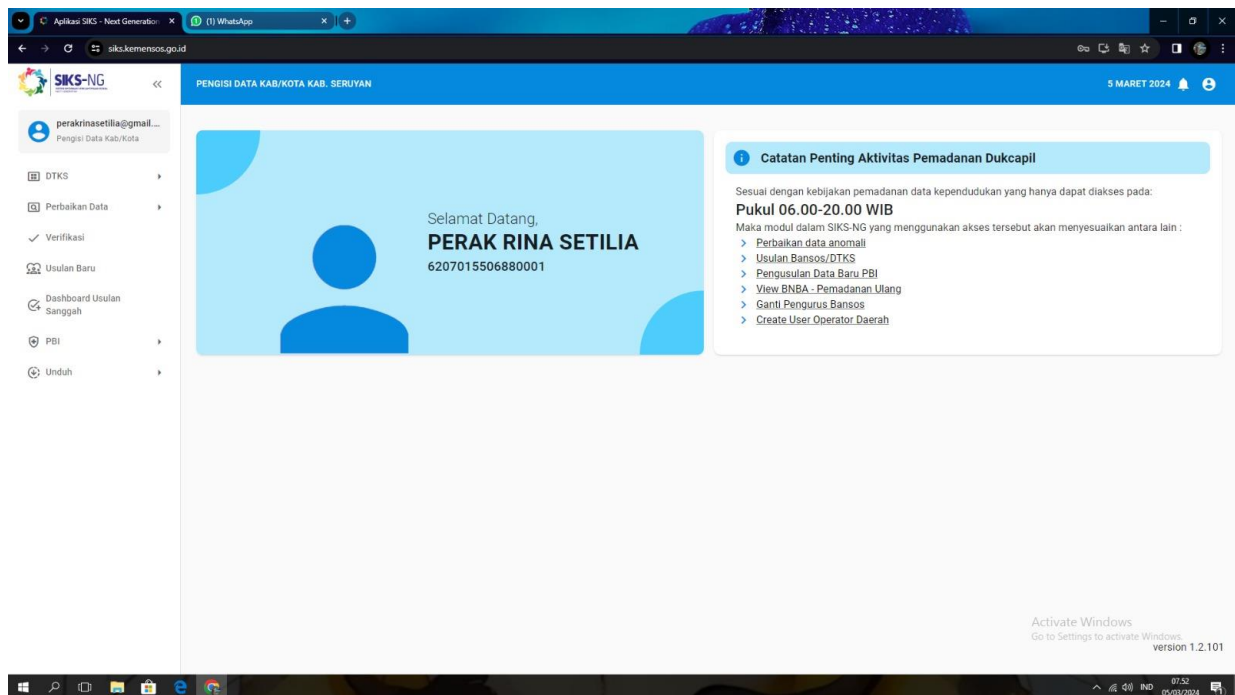
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS ini merupakan dasar pemberian bantuan sosial oleh kemensos.

Kegunaann aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) adalah menghadirkan data kemiskinan yang akurat. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan ini tidak hanya ditentukan oleh program-program yang tepat inovatif, tetapi juga harus didukung dengan kriteria kemiskinan yang jelas, serta data yang akurat dan up to date. Dalam rangka mengumpulkan data yang up to date tersebut, perlu dilakukan verifikasi dan validasi secara berkala sesuai dengan jenis programnya.

Data Terpadu, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kementerian Sosial didukung oleh Pemerintahan Daerah (Dinas Sosial) melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan yang akurat, up to date, dan terintegrasi. Pelaporan pendaftaran, atau perubahan data dilakukan secara berjenjang dari tingkat pedesaan / kelurahan, kecamatan, kabupaten / kotamadya, gubernur, sampai pada Menteri Sosial.

Sampai dengan akhir tahun 2023 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sebanyak 48.658 Jiwa dan yang menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Program Sembako, Bantuan Sosial Bantuan Sosial (PBI) Jaminan Kesehatan JKN, Bantuan Sosial BLT EL Nino, Bantuan Sosial Atensi dan Bansos Lainnya sebanyak 48.644 Jiwa.

Gambar 2.2
Aplikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIK NG



BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2023*
2. *Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja*
3. *Realisasi Anggaran*
4. *Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Sosial*

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dengan Bupati Seruyan tahun 2023. Pengukuran Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada laporan ini diberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaporan Kinerja didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2023, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja dengan rincian dapat dilihat pada tabel di bawah berikut :

Tabel 3.2
Sasaran dan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	2.633 Jiwa	50.001 Jiwa	1.276 %

RUMUS IKU

Σ Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani(x)

**RUMUS
CAPAIAN**

Persentase Pencapaian Target = $\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Data Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terdata dan tertangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2023

NO	PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	TAHUN 2023	
		YANG TERDATA (JUMLAH JIWA)	YANG TERTANGANI (JUMLAH JIWA)
1	Anak balita terlantar	1	1
2	Anak terlantar	2	2
3	Anak berhadapan dengan hukum (ABH)	14	14
4	Anak Jalanan	-	-
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	-	-
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan / diperlakukan salah	-	-
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	2	2
8	Lanjut Usia	1.603	235
9	Penyandang Disabilitas	320	103
10	Tuna Susila	-	-
11	Gelandangan	-	-
12	Pengemis	4	4
13	Pemulung	7	7

14	Kelompok Minoritas	6	-
15	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBLP)	218	-
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	-
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-	-
18	Korban Trafficking	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	6	6
21	Korban Bencana Alam	-	-
22	Korban Bencana Sosial	966	966
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	17	17
24	Fakir Miskin	48.658	48.644
25	Keluarga bermasalah sosial psikologis	-	-
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-
JUMLAH		51.824	50.001

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdata dan tertangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2023

NO	POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)	JUMLAH
1	Pekerja Sosial (Profesional)	9
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	10
3	Taruna siaga Bencana (TAGANA)	69
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	9
5	Karang taruna	50
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	0
7	Keluarga pioner	0
8	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	10
9	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)	0
10	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	0
11	Penyuluh Sosial	5
12	Dunia Usaha	1
JUMLAH PSKS		163

3.2. Analis dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023

Analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2023 dilakukan dengan cara menganalisis

capaian kinerja pada sasaran yang telah ditetapkan, yaitu:

Sasaran : Menurunnya Angka Kemiskinan

3.2.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023 dan perbandingan data kinerja Tahun 2023 yang dilihat dari awal tahun kinerja dimulai diperbandingkan dengan akhir tahun kinerja yang diperoleh, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Kategori Capaian
1.	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	2.633 Jiwa	50.001 Jiwa	1.276 %	Sangat baik

Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani merupakan hasil dari Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani dalam Tahun 2022 dengan dilakukan perhitungan diperoleh realisasi kinerja sebesar 50.001 Jiwa (PMKS yang tertangani), dari penetapan targetnya untuk indikator kinerja Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani sebesar 2.633 jiwa, dengan capaian kinerja diperoleh sebesar 1.276 % kategori Sangat Baik.

Tujuan (Urusan Wajib Sosial) Renstra jangka menengah Dinas Sosial adalah Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang, Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Dan Sasaran (Urusan Wajib Sosial) Renstra jangka menengah Dinas Sosial adalah Menurunnya Tingkat Kemiskinan dengan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani, ditetapkan target mencapai maksimal 100% (seratus persen) dalam setiap tahun. Diharapkan 26 (dua puluh enam) elemen PPKS dapat terdata dan tertangani secara optimal selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan jumlah PMKS bisa menurun secara signifikan.

Sampai dengan Tahun 2023 capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial terealisasi sebanyak 50.001 jiwa atau 1.899 % dari target sebanyak 2.633 jiwa. Terlampaui tingginya realisasi capaian kinerja tahun 2023 sebesar 1.276 % disebabkan oleh Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani meningkat sangat besar (target yang ditetapkan dalam Renstra terlalu rendah). Hal tersebut merupakan dampak inflasi kenaikan kebutuhan pokok dan kenaikan harga BBM yang menjadi salah satu faktor inflasi yang berpengaruh cukup besar.

Salah satu penanganan inflasi jangka pendek adalah bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT sumber dana DBHDR, serta Jaminan Sosial berupa Bantuan Sosial yang regular jangka panjang berupa Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional yang mengakibatkan banyaknya masyarakat terdampak inflasi tersebut menerima bantuan sosial (tertangani), baik itu mendapat bantuan dari pusat ataupun dari Pemerintah Daerah.

Kemudian yang tidak bisa di hindari kejadian bencana sosial yang bersifat insidentil yang mengakibatkan bertambahnya jumlah masyarakat yang menjadi korban kebencanaan (kebakaran / rumah rubuh / konflik sosial dan lainnya) yang mengakibatkan jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) menjadi meningkat pula.

3.2.2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir

3.2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah.

Berikut ini capaian indikator kinerja utama pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sampai dengan Tahun 2023 yang tersaji pada

tabel berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Keluaran / Output Capaian Kinerja Program
Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target Indikator	Satuan Indikator	Realisasi Keluaran /Output
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Kerja yang mendapat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	101
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Pekerja Sosial	75	%	100
	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	80	%	0
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	95	%	100
	Persentase PMKS Skala yang memperoleh Bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar	95	%	94
	Persentase PMKS yang menerima bantuan sosial	95	%	94
	Persentase PMKS yang tertangani	95	%	96
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Perlindungan dan Jaminan Sosial	80	%	100
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	%	87
	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	90	%	100
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik	100	%	100
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program				89% (tinggi)

Dari 5 (lima) Program Urusan Wajib Sosial dan 1 (satu) Program Penunjang sampai dengan Tahun 2023 telah mencapai realisasi rata-rata kinerja program kegiatan sebesar 89%, dengan predikat penilaian kinerja “tinggi”. Ada 1 (satu) indikator Capaian Kinerja Kegiatan Dinas Sosial masih rendah untuk indikator kinerja outcome yaitu Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dari target 98% masih belum terealisasi (0%) disebabkan karena sampai saat ini Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang terbentuk di tingkat Rukun Warga (RW) masih belum bisa menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial yang layak harus dipenuhi secara minimum sesuai PP 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

3.2.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan

kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan adalah indikator outcome yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut. Secara rinci, penetapan indikator kinerja kunci merupakan indikator kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disempurnakan pada indikator urusan pelayanan umumnya melalui Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun Indikator Kinerja Kunci daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah yang merupakan tanggungjawab Dinas Sosial Kabupaten Seruyan diuraikan pada Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023, sesuai tabel berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Outcome Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Penjelasan capaian	
													Faktor Pendukung	Faktor Kendala/Penghambat
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Unit	4	4	8	8	8	4	8	9	8	6	Adanya kemudahan proses perizinan dapat membantu LKSA untuk mengurus ijin operasional dan akreditasi sehingga status kelembagaan LKSA lebih jelas	Minimnya pendanaan bagi operasional LKSA yang hanya bersumber dari donatur yayasan/ perkumpulan
2	Persentase Pemberdayaan Sosial	Persen	95	95	98	98	98	100	98	100	98	100	Target indikator pemberdayaan sosial dapat tercapai dengan adanya Pelatihan bagi PSKS yang diadakan oleh Dinas Sosial / Balai pelatihan	Kurangnya koordinasi dalam persiapan penertiban perizinan PUB / UGB.
3	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	95	95	98	98	98	0	98	0	98	0	Adanya Dana Desa diharapkan dapat sharing anggaran untuk memenuhi persyaratan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial yang layak yang harus dipenuhi secara minimum sesuai PP 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Keterbatasan anggaran Dinsos untuk memenuhi persyaratan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial yang layak bagi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang terbentuk di tingkat Rukun Warga (RW)
4	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	98	98	98	98	98	100	98	100	98	94	Assesment awal dan Verifikasi/ validasi data DTKS membantu memilah PMKS yang layak mendapat bantuan sosial / perlu penanganan lain berupa bimbingan, pelatihan, reunifikasi, rujukan dan layanan lainnya	Layanan untuk penanganan orang terlanter masih minim penganggaran
5	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	98	98	98	98	98	100	98	100	98	96	Penanganan terhadap PMKS selain pemberian Bansos juga berupa layanan reunifikasi, assesment kebutuhan PMKS, pendampingan dan peningkatan keterampilan PMKS	Sebagian Data PMKS yang tidak valid memerlukan verifikasi dan validasi data dengan dukungan anggaran pemutakhiran data yang memadai
6	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	98	98	98	98	98	100	98	100	98	94	Adanya Bansos bersumber dana APBD (Bansos BLT, Bansos permukiman, sandang dan alat bantu) di tambah dengan bansos bersumber dana APBN (PKH, Sembako, El Nino dan PBI) dapat mencukupi pemberian bansos bagi PMKS Kabupaten Seruyan	Perlu dukungan anggaran agar pemberian Bansos dapat maksimal diberikan kepada PMKS
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	95	95	95	95	95	100	95	100	95	100	Pemberian paket permakanan melalui program ATENSI Rehabilitasi Sosial	Perlu verifikasi dan validasi data dengan dukungan anggaran pemutakhiran data yang memadai
8	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	97	97	97	97	97	100	97	100	97	87	Pemberian bansos permakanan tidak untuk semua korban bencana hanya untuk korban bencana kebakaran dan kelompok rentan, karena untuk korban konflik sosial jaminan permakanan ditanggung oleh pihak Perusahaan	Minimnya kendaraan operasional untuk mendistribusikan bantuan sosial kepada korban
9	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	97	97	97	97	97	0	97	0	97	100	Koodinasi berbagai OPD terkait dan kesiapsiagaan TAGANA mempercepat penanganan dan evakuasi terhadap warga terdampak konflik sosial yang perlu di evakuasi	Kondisi sarana prasarana peralatan evakuasi yang sebagian besar rusak memerlukan biaya operasional pemeliharaan

Penetapan indikator kinerja kunci daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah yang merupakan tanggungjawab Dinas Sosial Kabupaten Seruyan diuraikan pada Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (Dampak/Impact) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023, sesuai tabel berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Sasaran (Dampak/Impact) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Penjelasan capaian	
													Faktor Pendukung	Faktor Kendala/Penghambat
1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jiwa	2.753	5.401	2.723	6.558	2.693	29.147	2.663	79.673	2.633	50.001	Dengan adanya Bansos bersumber dana dari APBD dan APBN dapat meningkatkan penanganan / perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat	Dampak inflasi kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan harga BBM, kejadian bencana sosial / konflik sosial dan kebakaran rumah yang merupakan faktor meningkatnya jumlah PMKS

3.2.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Berdasarkan Dokumen Perubahan Rencana Strategis periode Tahun 2018-2023 yang disajikan pada sasaran merupakan pelaksanaan Tahun ke-5 (lima) dari Dokumen Perubahan Renstra untuk periode 2018-2023.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja

NO	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
1.	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	2.633 Jiwa	50.001 Jiwa	1.276 %

Berdasarkan tabel diatas untuk realisasi kinerja Tahun 2023 meningkat sangat besar dibanding target yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra Tahun 2021. Persentase Tingkat kemajuan sebesar 1.276% di dapat dari perhitungan kenaikan realisasi dengan rumusan selisih 46.368 (realisasi-target) dibagi dengan target akhir RPJMD 2.633 dikali dengan seratus persen. Dengan Realisasi Kinerja yang diperoleh untuk Indikator Kinerja Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Tahun 2023 sebesar 50.001 Jiwa dari target yang ada didalam Perubahan Renstra Tahun 2021 sebesar 2.633 Jiwa.

Realisasi Kinerja yang sangat tinggi dikarenakan bertambahnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) disebabkan oleh Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani meningkat sangat besar (target yang ditetapkan dalam Renstra terlalu rendah). Hal tersebut merupakan dampak inflasi kenaikan kebutuhan pokok dan kenaikan harga BBM yang menjadi salah satu faktor inflasi yang berpengaruh cukup besar. Kemudian yang tidak bisa di hindari kejadian bencana sosial yang bersifat insidentil yang mengakibatkan bertambahnya jumlah masyarakat yang menjadi korban kebencanaan (kebakaran / rumah rubuh / konflik sosial dan lainnya) yang mengakibatkan jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) menjadi meningkat pula.

3.2.4 Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Pada pelaksanaan kinerja tahun 2023 terdapat beberapa penyebab keberhasilan dan penyebab penurunan dalam Capaian Realisasi Kinerja yang mempengaruhi pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan. Berikut tabel Analisis Keberhasilan / Kegagalan yang di hadapi pada Tahun 2023 :

Tabel 3.10
Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Hal Yang Dilakukan /Solusi/ Tindak Lanjut
1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	50.001 Jiwa	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya pemanfaatan Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Seruyan dalam membantu menanggulangi masalah sosial, 2. Penambahan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan dukungan anggaran yang terbatas mengakibatkan mutu pelayanan /penanganan terhadap PMKS tidak maksimal, 3. Kelemahan dalam administrasi dasar pelaksanaan (juklak dan juknis) pemberian hibah dan Bantuan Sosial, 4. Permasalahan data yang tidak valid sehingga pemberian bantuan tidak tepat sasaran. 5. Data keterlambatan untuk penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak yang tidak valid, 6. Penanganan kasus penyandang disabilitas mental (ODGJ) yang masih belum maksimal, 7. Penanganan kesiapsiagaan bencana dan pasca bencana yang belum maksimal, 8. Terbatasnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan urusan wajib sosial dan penunjang pelayanan administrasi perkantoran. 9. Adanya refocusing anggaran <p>Faktor pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan kepedulian sosial, 2. Adanya media sosial dan jaringan online untuk layanan dan aduan dari masyarakat, yang mendukung percepatan penanganan masalah sosial, menyebabkan respon pihak terkait bisa maksimal, 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat / lembaga atas program Dinas Sosial tentang pentingnya izin undian gratis dan pengumpulan uang dan barang dalam penyelenggaraan kegiatan undian gratis dan pengumpulan uang dan barang, 4. Meningkatnya kapasitas potensi sumber tenaga kesejahteraan sosial Kabupaten Seruyan di Kecamatan/Desa, 5. Adanya Koordinasi yang baik antar Kecamatan/Desa mengenai data serta Sistem Aplikasi SIGN-G yang dapat mempermudah dalam pemutakhiran Data pada DTKS. 	<p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan PPKS / PSM tingkat Kecamatan/Desa 2. Kesiapan mitigasi bencana, taanggap darurat bencana dan pengoptimalan verifikasi dan validasi data DTKS SIK-NG 3. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menunjang kinerja Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani, sehingga penanganan bisa maksimal, 4. Penyusunan juklak dan Juknis di awal kegiatan, Peningkatan koordinasi dan konsultasi kepada APIP, BPKP, BKAD, bagian Hukum Setda, agar Juklak dan Juknis bisa meminimalisir resiko 5. Pelaksanaan verifikasi dan validasi terpadu berkoordinasi dengan pihak terkait kecamatan/ desa / kelurahan, agar bantuan sosial tepat sasaran, 6. Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait kecamatan/ desa / kelurahan untuk validasi data keterlambatan, 7. Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dan pemangku kebijakan agar penanganan ODGJ bisa maksimal dengan melibatkan semua pihak sesuai dengan tugas masing-masing, 8. Peningkatan kinerja dan peningkatan keterampilan atas mitigasi bencana, kesiapsiagaan bencana 9. Upaya maksimal pelaksanaan program/kegiatan urusan sosial dan penunjang, koordinasi dengan pihak TAPD dan Banggar DPRD untuk upaya penambahan anggaran 10. Evaluasi terhadap program kegiatan yang dilaksanakan sehingga prioritas kegiatan lebih maksimal dan memfokuskan kembali kegiatan agar bisa meningkatkan pelayanan sosial <p>Tindak lanjut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Sistem Terpadu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dari pihak semua terkait dan peningkatan instrumen pendukung 2. Ddukungan anggaran yang memadai agar pelaksanaan pelayanan sosial lebih maksimal 3. Peningkatan / pembinaan potensi untuk profesionalitas potensi sumber tenaga kesejahteraan sosial (PSKS) Kabupaten Seruyan, melalui koordinasi, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan 4. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern agar resiko kegiatan pelayanan sosial dapat diminimalisir.

3.2.5 Analisis Atas RB Tematik Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2023

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Perbandingan data Kemiskinan di

Kabupaten Seruyan tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Data Kemiskinan Kabupaten Seruyan

No	Kemiskinan	2022	2023	Kenaikan / Penurunan
1	Persentase Penduduk Miskin (P0) (Persen)	7,43	7,12	0,31
2	Gini Rasio	0,292	0,261	0,031
3	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	571 049	blm ada data	
4	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,36	0,1	0,26
5	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,25	0,6	0,65
6	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	15,96	8,95	7,01
Sumber Data : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor (BPS)				

Angka Kemiskinan Kabupaten Seruyan pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, terlihat dari Persentase penduduk miskin yang turun 0,31% dari angka kemiskinan Tahun 2022 sebesar 7,43% dan Tahun 2023 sebesar 7,12%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat mengalami kenaikan sehingga jumlah penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan semakin berkurang, berbanding lurus dengan indeks keparahan kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan yang juga menurun.

Peranan Dinas Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Seruyan terkait dengan Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Seruyan. Tagging Pengentasan Kemiskinan Dinas Sosial dilaksanakan dalam 3 Program 5 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan

Langkah strategis yang dilaksanakan Dinas Sosial yaitu :

1. Menurunkan beban pengeluaran, melalui penyaluran Bansos PKH, Program Sembako, Bansos Penerima Bantuan Iuran (PBI), Bansos BLT untuk masyarakat pinggir hutan (DBHDR), Bansos Permakanan, Bansos Sandang, Bansos Alat Bantu penyandang disabilitas.
2. Meningkatkan pendapatan, melalui Pelatihan kewirausahaan, motivasi dan edukasi, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Bansos Barang stimulan usaha, pelatihan bina remaja, pelatihan keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Upaya Pengentasan Kemiskinan dari Dinas Sosial dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Dengan klasifikasi permasalahan, sasaran, rencana aksi dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.12
Rencana Aksi RB Tematik Pengentasan Kemiskinan

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Penjelasan Rencana Aksi	Output			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	Capaian Target Kinerja			Koordinator Bagian / Bidang	Pelaksana Dinas / Badan
Data kemiskinan belum terpadu (penggunaan basis data yang berbeda antar masing-masing OPD)	Tersedianya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial - DTKS)	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten	80%	Pelaksanaan Pendataan dan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIK-NG)	Pendataan , Verifikasi dan Validasi data terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Perlindungan Sosial yang lengkap dan akurat; Pengelolaan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); pemadanan data DTKS dengan NIK	55.387 KPM	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada DTKS	48.658 KPM	122.778.000	122.078.542	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS
Perlindungan dan Jaminan Sosial yang belum maksimal (Saldo nol, KPM yang dikeluarkan otomatis dari DTKS, alamat KPM yang tidak ditemukan dan warga miskin yang belum mendapat bantuan sosial)	Terfasilitasinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada DTKS yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	80%	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kegiatan Sosialisasi, pendampingan penyaluran dan monitoring evaluasi bantuan sosial sumber dana DBHDR untuk warga kawasan pinggir hutan untuk 1000 KPM (300 / bln, selama 3 bln), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Bansos lainnya	10.000 KPM	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	48.658 KPM	2.831.735.000	2.602.480.911	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS
Belum maksimalnya pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Dasar terhadap Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PMKS lainnya (aksesibilitas penyandang disabilitas masih rendah, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PMKS lainnya yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya)	Terlaksananya pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100%	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial; dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pengadaan paket permakanan untuk lansia terlantar sesuai standar gizi minimal, Pengadaan sandang / peralatan sholat untuk anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Penyediaan Alat Bantu penyandang disabilitas, Pelayanan Reunifikasi Keluarga bagi penyandang disabilitas mental (ODGU) dan orang terlantar, Penjaringan anak-anak terlantar / putus sekolah untuk mendapatkan pelatihan di PSBR, Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga dan bansos barang stimulan usaha, Fasilitasi pembuatan identitas diri, fasilitasi pembuatan jaminan kesehatan/ BPJS, Layanan Data dan Pengaduan, Layanan Kedaruratan, Pelayanan Penelusuran Keluarga , Layanan Rujukan ke RSJ/ Panti Sosial / Balai Rehabilitasi dan Kerjasama pelayanan rehabilitasi sosial antara Dinsos - Panti Sosial dan RS / RSJ.	293 Orang	Jumlah orang yang mendapatkan layanan sesuai kebutuhannya	407 Orang	299.281.000	294.203.400	Bidang Rehabilitasi Sosial	DINSOS
Rendahnya pemahaman tentang perizinan pengumpulan uang / barang dan perizinan undian gratis berhadiah, dalam mendukung pelayanan kesejahteraan sosial	Meningkatnya pemahaman dari LKS /Instansi /Lembaga Penyelenggara PUB dan UGB	Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang	75%	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Pelaksanaan Sosialisasi penyelenggaraan perizinan pengumpulan uang / barang dan perizinan undian gratis berhadiah, Penerbitan PUG dan UGB dalam mendukung pelayanan kesejahteraan sosial	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Dokumen	36.711.000	36.626.800	Bidang Pemberdayaan Sosial	DINSOS
Rendahnya Kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial untuk mendukung pelayanan kesejahteraan sosial program pengentasan kemiskinan	Terlaksananya pengembangan kompetensi bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), PSKS Keluarga dan PSKS Kelembagaan	Persentase Meningkatnya kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial	100%	Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM Kessos)	Peningkatan Kapasitas SDM kesejahteraan sosial melalui pelatihan, pemberian motivasi dan edukasi, pelatihan kewirausahaan dan bantuan barang untuk stimulan usaha dan bantuan hibah operasional Lembaga Karang Taruna Kabupaten dan Kecamatan	20 orang / 2 keluarga 7 lembaga	Jumlah Orang / Keluarga / Lembaga yang Meningkatkan Kapasitasnya	17 orang / 0 keluarga 12 lembaga	319.045.500	315.007.800	Bidang Pemberdayaan Sosial	DINSOS

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS SOSIAL TAHUN 2023

Rendahnya Kompetensi SDM Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) untuk mendukung pelayanan kesejahteraan sosial terhadap keluarga yang bermasalah	Meningkatnya Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) terhadap keluarga yang bermasalah	Meningkatnya kompetensi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 LK3	Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Peningkatan kapasitas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang memberikan pelayanan konsultasi, konseling, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan keluarga serta rujukan ke lembaga pelayanan lainnya,	10 orang	Jumlah Orang / pengurus LK3 yang meningkat kapasitasnya	10 orang	28.197.000	26.458.300	Bidang Pemberdayaan Sosial	DINSOS
Jumlah									3.637.747.500	3.396.855.753		

3.2.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.13
Ketersediaan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN)

NO	NAMA JABATAN	STATUS ASN	
		PNS	HONORER
1	KEPALA DINAS	1	-
2	PEKERJA SOSIAL MADYA	-	-
3	PEKERJA SOSIAL MUDA	7	-
4	PEKERJA SOSIAL PERTAMA	-	-
5	PEKERJA SOSIAL PELAKSANA TERAMPIL	-	-
6	PEKERJA SOSIAL PELAKSANA PEMULA	1	-
7	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA	-	-
8	PERENCANA MADYA	-	-
9	PERENCANA MUDA	-	-
10	PERENCANA PERTAMA	-	-
11	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	-	-
12	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	1	-
13	SEKRETARIS	1	-
14	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	1	-
15	PENYUSUN PROGRAM DAN PELAPORAN	1	-
16	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	-	1
17	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	-	1
18	PENATA LAPORAN KEUANGAN	1	-
19	BENDAHARA	1	-
20	VERIFIKATOR KEUANGAN	-	-
21	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	-	1
22	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN	1	-
23	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	-	-
	ANALIS BARANG MILIK NEGARA	1	-
24	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	-	-
25	PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN	-	-
26	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	-	2
27	ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR	-	-
28	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	-	1
29	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	-
30	ANALIS PELAYANAN SOSIAL	-	-
31	ANALIS MASALAH SOSIAL	2	-
32	PENGELOLA DATA BANTUAN SOSIAL	-	1
33	PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	-	1
34	PENGADMINISTRASI UMUM	-	1
35	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL	1	-
36	ANALIS REHABILITASI MASALAH SOSIAL	-	1
37	PENGELOLA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DAN LANSIA	-	1
38	PENGELOLA REHABILITASI SOSIAL	-	1
39	PENGADMINISTRASI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG CACAT	-	1
40	PENGADMINISTRASI REHABILITASI MASALAH SOSIAL	-	2
41	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	-
42	ANALIS PELAYANAN SOSIAL	-	-
43	ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL	-	1
44	PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH	-	1
45	PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	-	1

46	PENGADMINISTRASI UMUM	-	1
47	KEPALA BIDANG PENANGANAN BENCANA	1	-
48	ANALIS PELAYANAN SOSIAL	2	-
49	PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH	-	1
50	PENGELOLA PERLINDUNGAN SOSIAL	-	1
51	PENGELOLA LOGISTIK	-	1
52	PENGADMINISTRASI UMUM	-	1
JUMLAH		25	23

Selain tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) pelayanan Dinas Sosial juga dibantu dengan tenaga honorer/kontrak bidang administrasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.

3.2.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dinas Sosial merupakan SKPD yang terkait langsung dengan pelayanan publik, maka telaahan terhadap usulan masyarakat lebih diutamakan dalam upaya penyusunan kegiatan yang lebih baik dan akuntabel. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dan dibutuhkan untuk meningkatkan Pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana
5. Program Pengelolaan Taman makam Pahlawan

Capaian indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada 6 (enam) program dan 15 (lima belas) kegiatan dengan rincian dibandingkan dengan capaian realisasi keuangan sebagai berikut :

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Per Program Dinas Sosial Kabupaten Seruyan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Realisasi Keuangan (%)	Target Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja	Penjelasan Singkat Atas Realisasi Kinerja (Tidak Optimal, Melampaui Target, Kurang Optimal, Tidak Terealisasi)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		96,77	100%	89%	Penyerapan anggaran optimal, target kinerja tercapai
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		96,77	100%	89%	Penyerapan anggaran optimal, target kinerja tercapai
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Unit Kerja yang mendapat Pelayanan Administrasi Perkantoran	99,00	100%	101%	Penyerapan anggaran optimal, target kinerja tercapai
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun tepat waktu	99,87	100%	120%	Penyerapan anggaran optimal, target kinerja melampaui target karena dari 10 dokumen yang direncanakan, terealisasi 12 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99,94	7 Dokumen	9 Dokumen	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,51	3 Dokumen	3 Dokumen	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan baik	99,34	100%	97%	Penyerapan anggaran optimal, kinerja tidak mencapai target karena dari 30 orang yang ditargetkan tercapai 27 Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan, disebabkan adanya mutasi dan promosi PNS
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99,34	30 Orang	27 Orang	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95,28	100%	100%	Penyerapan anggaran optimal, target kinerja tercapai
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	92,8	32 paket	27 Paket	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98,13	1 orang	4 Orang	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	98,45	100%	105%	Penyerapan anggaran optimal, target kinerja melampaui target karena dari 1.469 paket/dokumen/laporan yang direncanakan, terealisasi 1538 paket/dokumen/laporan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	99,95	2 paket	5 paket	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	98,59	3 paket	15 paket	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	99,68	3 paket	10 paket	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	99,51	2 paket	7 paket	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	90,77	3 paket	8 paket	

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS SOSIAL TAHUN 2023

	Disediakan				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	77,34	1406 dokumen	1406 dokumen	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,94	50 laporan	87 laporan	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	1 tahun	1 tahun	Penyerapan anggaran optimal, target kinerja tercapai
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	10 unit	10 unit	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	1 unit	1 unit	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,53	1 tahun	1 tahun	Penyerapan anggaran optimal, target kinerja tercapai
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	850 Laporan	850 Laporan	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	98,39	1 laporan	4 Laporan	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	94,2	3 laporan	9 Laporan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	98,72	1 laporan	4 Laporan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97,39	1 tahun	1 tahun	Penyerapan anggaran optimal, target kinerja tercapai
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	97,03	10 unit	10 unit	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	98,06	4 unit	4 unit	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	98,47	98%	100%	Penyerapan anggaran optimal, target kinerja tercapai
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang	99,77	92%	100%	Penyerapan anggaran optimal, target kinerja tercapai
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	99,77	10 dokumen	10 dokumen	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	98,34	90%	100%	Penyerapan anggaran optimal, target kinerja tercapai
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	90,5	10 orang	7 Orang	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	98,75	10 orang	10 Orang	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	93,16	2 keluarga	0 Orang	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	99,08	7 lembaga	12 Lembaga	
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	93,83	10 serfikat	10 sertifikat	

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS SOSIAL TAHUN 2023

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani	98,30	95%	100%	Penyerapan anggaran optimal, target kinerja tercapai
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.	98,26	98%	157%	Penyerapan anggaran optimal, target kinerja melampaui target karena dari 243 Orang terlayani sebanyak 357 Orang
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	99,85	100 orang	304 Orang	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	92,73	60 orang	1 Orang	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	99,06	26 orang	16 Orang	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	98,11	20 orang	18 Orang	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	89,46	20 orang	1 Orang	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	98,02	17 Orang	17 Orang	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan kepada Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial	98,51	100%	100%	Penyerapan anggaran optimal, target kinerja tercapai
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten /Kota	98,51	50 Orang	50 Orang	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penanganan Fakir Miskin dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	92,22	98%	100%	Penyerapan anggaran optimal, target kinerja tercapai
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Daerah Kabupaten	92,22	100%	100%	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	99,03	39906 Orang	48.658 Orang	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dikelola dalam DTKS	99,72	15411 Orang	1.747 Orang	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	91,76	2315 Orang	7348 Orang	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	98,44	50 Orang	50 Orang	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	99,41	97%	100%	Penyerapan anggaran optimal, target kinerja tercapai
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan Sosial Kabupaten yang mendapatkan perlindungan	99,44	100%	100%	
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	99,75	100 Orang	122 Orang	
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	99,87	20 Orang	52 Orang	
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan	98,83	20 Orang	150	

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS SOSIAL TAHUN 2023

	Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota			Orang	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang siap siaga Bencana	99,36	71 Orang	63 Orang	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	99,77	2 KSB	2 KSB	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	1) Jumlah kegiatan Bhakti Sosial yang dilaksanakan 2) Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	98,99	68 Orang	63 Orang	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik	95,14	100%	100%	Penyerapan anggaran optimal, target kinerja tercapai
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawanan Nasional Kab./Kota yang Dikelola dengan baik	95,14	100%	100%	
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	94,15	1 Dokumen	1 Dokumen	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	96,54	1 Makam	1 Makam	
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	90,91	1 Laporan	1 Laporan	
Capaian Realisasi		96,67		89%	Predikat Kinerja Tinggi

3.2.8 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya / Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2023

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial telah tercantum dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial termasuk dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam pembagian kewenangannya maka kebijakan umum SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti (bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis); serta
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

SPM Bidang Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Sosial kabupaten/Kotai mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti; dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Adapun realisasi SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.15
Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Penerima Layanan	Realisasi Capaian	Kategori
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	103	100 %	Tuntas Paripurna
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	5	38 %	Belum Tuntas
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	150	75 %	Tuntas Pratama

4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	4	100 %	Tuntas Paripurna
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.	Jumlah Warga Negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.	966	100 %	Tuntas Paripurna

3.2.9 Capaian Kinerja Pelayanan Sarana Sosial

Sarana Sosial berupa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sangat penting karena sebagai wadah untuk mendapatkan layanan kesejahteraan untuk anak-anak tidak mampu atau tidak memiliki keluarga, berikut data LKSA yang terdapat di Kabupaten Seruyan :

Tabel 3. 16
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pelayanan LKSA 2023

LKSA	Capaian Kinerja Pelayanan					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	8	4	4	5	5	6

Pada tahun 2023 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang masih aktif berjumlah 6 LKSA yaitu LKSA Hj. Maskacil, Al Mustaghfirin, Hidayatul Salikin di Kecamatan Hanau dan Rodatul Tolibin di Kecamatan Seruyan Raya, dan Darul Madani Seruyan.

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023. Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Seruyan telah menetapkan program yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan kedalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

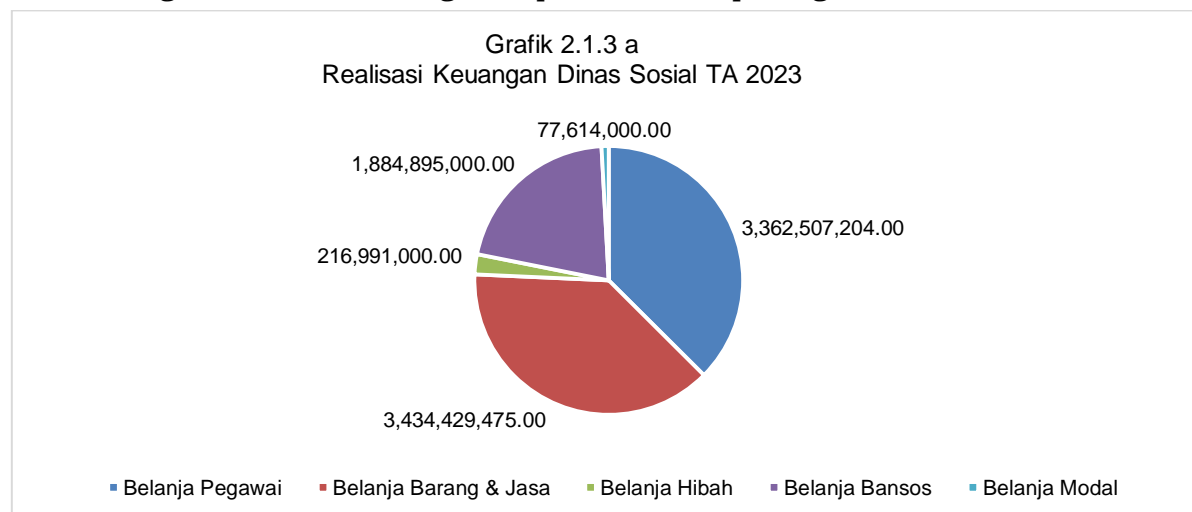
Pada tahun 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan untuk Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sebesar Rp.9.276.170.724,00, sedangkan untuk realisasi sebesar Rp.8.976.436.679,00 atau 96,77 % dengan demikian dapat dikatakan pada tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Seruyan terdapat tersisa anggaran yang tidak terpakai (Siltap) sebesar Rp.299.734.045,00.

Realisasi Anggaran tahun 2023 yang mempengaruhi pencapaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Tahun 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5	BELANJA DAERAH	9.276.170.724,00	8.976.436.679,00	96,77
5.1	BELANJA OPERASI	9.197.056.724,00	8.898.822.679,00	96,76
5.1.01	Belanja Pegawai	3.387.673.122,00	3.362.507.204,00	99,26
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.894.291.122,00	1.880.045.796,00	99,25
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.348.740.000,00	1.341.554.408,00	99,47
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	144.642.000,00	140.907.000,00	97,42
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.707.092.602,00	3.434.429.475,00	92,64
5.1.02.01	Belanja Barang	664.702.150,00	651.515.500,00	98,02
5.1.02.02	Belanja Jasa	655.379.812,00	641.254.172,00	97,84
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	140.830.640,00	138.249.250,00	98,17
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.246.180.000,00	2.003.410.553,00	89,19
5.1.05	Belanja Hibah	216.991.000,00	216.991.000,00	100,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	216.991.000,00	216.991.000,00	100,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.885.300.000,00	1.884.895.000,00	99,98
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.885.300.000,00	1.884.895.000,00	99,98
5.2	BELANJA MODAL	79.114.000,00	77.614.000,00	98,10
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.614.000,00	77.614.000,00	100,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	61.114.000,00	61.114.000,00	100,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	0	0,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	0	0,00
JUMLAH		9.276.170.724,00	8.976.436.679,00	96,77

Perbandingan realisasi keuangan dapat kita baca pada grafik dibawah ini :



Capaian realisasi keuangan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada 6 program dan 15 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Program Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2023

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi					Sisa Anggaran	Penjelasan Singkat Atas Realisasi Belanja (Tidak Optimal, Melampaui Target, Kurang Optimal, Tidak Terealisasi)
			Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Total	%		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9.276.170.724,00	3.362.507.204,00	5.536.315.475,00	77.614.000,00	8.976.436.679,00	96,77	299.734.045,00	Penyerapan anggaran optimal, target kinerja tercapai
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	9.276.170.724,00	3.362.507.204,00	5.536.315.475,00	77.614.000,00	8.976.436.679,00	96,77	299.734.045,00	Penyerapan anggaran optimal, target kinerja tercapai
1.06.1.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.250.119.724,00	3.362.507.204,00	1.757.347.922,00	77.614.000,00	5.197.469.126,00	99,00	52.650.598,00	Penyerapan anggaran optimal, target kinerja tercapai
1.06.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	167.113.800,00	0,00	166.901.800,00	0,00	166.901.800,00	99,87	212.000,00	
1.06.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	141.327.000,00	0	141.241.800,00	0	141.241.800,00	99,94	85.200,00	
1.06.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.786.800,00	0	25.660.000,00	0	25.660.000,00	99,51	126.800,00	
1.06.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.265.531.122,00	3.244.100.204,00	0,00	0,00	3.244.100.204,00	99,34	21.430.918,00	
1.06.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.265.531.122,00	3.244.100.204,00	0	0	3.244.100.204,00	99,34	21.430.918,00	
1.06.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.970.000,00	0,00	66.664.000,00	0,00	66.664.000,00	95,28	3.306.000,00	
1.06.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	37.500.000,00	0	34.800.000,00	0	34.800.000,00	92,8	2.700.000,00	
1.06.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32.470.000,00	0	31.864.000,00	0	31.864.000,00	98,13	606.000,00	
1.06.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	809.569.250,00	0,00	767.648.700,00	29.395.000,00	797.043.700,00	98,45	12.475.550,00	
1.06.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.481.000,00	0	11.475.000,00	0	11.475.000,00	99,95	6.000,00	
1.06.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	167.905.000,00	0	149.041.000,00	16.500.000,00	165.541.000,00	98,59	2.364.000,00	
1.06.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	53.082.250,00	0	40.020.000,00	12.895.000,00	52.915.000,00	99,68	167.250,00	
1.06.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.110.000,00	0	116.533.000,00	0	116.533.000,00	99,51	577.000,00	
1.06.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.917.000,00	0	59.835.000,00	0	59.835.000,00	90,77	6.082.000,00	
1.06.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.498.000,00	0	10.440.000,00	0	10.440.000,00	77,34	3.058.000,00	
1.06.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	380.576.000,00	0	380.304.700,00	0	380.304.700,00	99,94	221.300,00	
1.06.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.219.000,00	0,00	0,00	48.219.000,00	48.219.000,00	100	0,00	
1.06.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	30.569.000,00	0	0	30.569.000,00	30.569.000,00	100	0	
1.06.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.650.000,00	0	0	17.650.000,00	17.650.000,00	100	0	
1.06.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	707.858.812,00	118.407.000,00	579.015.372,00	0,00	697.422.372,00	98,53	10.436.440,00	
1.06.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.100.000,00	0	12.100.000,00	0	12.100.000,00	100	0	
1.06.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.473.300,00	0	80.158.114,00	0	80.158.114,00	98,39	1.315.186,00	
1.06.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.510.000,00	0	26.857.500,00	0	26.857.500,00	94,2	1.652.500,00	
1.06.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	585.775.512,00	118.407.000,00	459.899.758,00	0	578.306.758,00	98,72	7.468.754,00	
1.06.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.857.740,00	0,00	177.118.050,00	0,00	177.118.050,00	97,39	4.739.690,00	
1.06.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.477.100,00	0	113.987.600,00	0	113.987.600,00	97,03	3.489.500,00	

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS SOSIAL TAHUN 2023

1.06.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.380.640,00	0	63.130.450,00	0	63.130.450,00	98,06	1.250.190,00	
1.06.2.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	383.953.500,00	0,00	378.092.900,00	0,00	378.092.900,00	98,47	5.860.600,00	Penyerapan anggaran optimal, target kinerja tercapai
1.06.2.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	36.711.000,00	0,00	36.626.800,00	0,00	36.626.800,00	99,77	84.200,00	
1.06.2.2.02.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	36.711.000,00	0	36.626.800,00	0	36.626.800,00	99,77	84.200,00	
1.06.2.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	347.242.500,00	0,00	341.466.100,00	0,00	341.466.100,00	98,34	5.776.400,00	
1.06.2.2.03.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6.747.000,00	0	6.106.200,00	0	6.106.200,00	90,5	640.800,00	
1.06.2.2.03.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	11.316.000,00	0	11.174.200,00	0	11.174.200,00	98,75	141.800,00	
1.06.2.2.03.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8.007.000,00	0	7.459.300,00	0	7.459.300,00	93,16	547.700,00	
1.06.2.2.03.4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	292.975.500,00	0	290.268.100,00	0	290.268.100,00	99,08	2.707.400,00	
1.06.2.2.03.5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	28.197.000,00	0	26.458.300,00	0	26.458.300,00	93,83	1.738.700,00	
1.06.4.2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	299.281.000,00	0,00	294.203.400,00	0,00	294.203.400,00	98,30	5.077.600,00	Penyerapan anggaran optimal, target kinerja tercapai
1.06.4.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	249.281.000,00	0,00	244.947.500,00	0,00	244.947.500,00	98,26	4.333.500,00	
1.06.4.2.01.1	Penyediaan Permakanan	59.806.000,00	0	59.718.500,00	0	59.718.500,00	99,85	87.500,00	
1.06.4.2.01.2	Penyediaan Sandang	1.100.000,00	0	1.020.000,00	0	1.020.000,00	92,73	80.000,00	
1.06.4.2.01.3	Penyediaan Alat Bantu	29.825.000,00	0	29.544.400,00	0	29.544.400,00	99,06	280.600,00	
1.06.4.2.01.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	98.780.000,00	0	96.916.600,00	0	96.916.600,00	98,11	1.863.400,00	
1.06. 4.2.01.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	9.773.000,00	0	8.742.800,00	0	8.742.800,00	89,46	1.030.200,00	
1.06.4.2.01.6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	49.997.000,00	0	49.005.200,00	0	49.005.200,00	98,02	991.800,00	
1.06.4.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	50.000.000,00	0,00	49.255.900,00	0,00	49.255.900,00	98,51	744.100,00	
1.06.4.2.02.7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50.000.000,00	0	49.255.900,00	0	49.255.900,00	98,51	744.100,00	
1.06.5.2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.954.513.000,00	0,00	2.724.559.453,00	0,00	2.724.559.453,00	92,22	229.953.547,00	Penyerapan anggaran optimal, target kinerja tercapai
1.06.5.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.954.513.000,00	0,00	2.724.559.453,00	0,00	2.724.559.453,00	92,22	229.953.547,00	
1.06.5.2.02.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	51.642.000,00	0	51.140.600,00	0	51.140.600,00	99,03	501.400,00	
1.06.5.2.02.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	71.136.000,00	0	70.937.942,00	0	70.937.942,00	99,72	198.058,00	
1.06.5.2.02.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.771.743.000,00	0	2.543.424.111,00	0	2.543.424.111,00	91,76	228.318.889,00	
1.06.5.2.02.4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	59.992.000,00	0	59.056.800,00	0	59.056.800,00	98,44	935.200,00	
1.06.6.2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	296.626.000,00	0,00	294.885.400,00	0,00	294.885.400,00	99,41	1.740.600,00	Penyerapan anggaran optimal, target kinerja tercapai
1.06.6.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	205.412.000,00	0,00	204.259.200,00	0,00	204.259.200,00	99,44	1.152.800,00	
1.06.6.2.01.1	Penyediaan Makanan	42.413.000,00	0	42.306.500,00	0	42.306.500,00	99,75	106.500,00	
1.06.6.2.01.4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	82.215.000,00	0	82.110.800,00	0	82.110.800,00	99,87	104.200,00	

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS SOSIAL TAHUN 2023

1.06.6.2.01.5	Pelayanan Dukungan Psikososial	80.784.000,00	0	79.841.900,00	0	79.841.900,00	98,83	942.100,00	
1.06.6.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	91.214.000,00	0,00	90.626.200,00	0,00	90.626.200,00	99,36	587.800,00	
1.06.6.2.02.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	43.087.000,00	0	42.987.400,00	0	42.987.400,00	99,77	99.600,00	
1.06.6.2.02.2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	48.127.000,00	0	47.638.800,00	0	47.638.800,00	98,99	488.200,00	
1.06.7.2	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	91.677.500,00	0,00	87.226.400,00	0,00	87.226.400,00	95,14	4.451.100,00	Penyerapan anggaran optimal, target kinerja tercapai
1.06.7.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	91.677.500,00	0,00	87.226.400,00	0,00	87.226.400,00	95,14	4.451.100,00	
1.06.7.2.01.1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	48.208.500,00	0	45.387.600,00	0	45.387.600,00	94,15	2.820.900,00	
1.06.7.2.01.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	41.230.000,00	0	39.803.400,00	0	39.803.400,00	96,54	1.426.600,00	
1.06.7.2.01.3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2.239.000,00	0	2.035.400,00	0	2.035.400,00	90,91	203.600,00	

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2023 dalam kaitannya dengan pencapaian terhadap penyerapan pagu anggaran belanja yang telah ditetapkan untuk mewujudkan indikator kinerja yang diharapkan. Kendala dan permasalahan tersebut didasarkan pada kondisi nyata gambaran umum, dengan uraian sebagai berikut.

1. Proses menerbitkan SK Petunjuk Teknis dan SK penerima manfaat yang lama menyebabkan proses penyaluran bantuan social terlambat dari jadwal yang direncanakan,
2. Validasi data calon penerima manfaat yang memakan waktu lama dari proses menyampaikan data BNBA hingga tindak lanjut desa untuk memastikan kelayakan calon penerima manfaat,
3. Adanya kelebihan penganggaran / sisa anggaran pada jasa administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian karena ada mutasi dan promosi PNS, sehingga menyebabkan penyerapan anggaran kurang optimal.
4. Pembatasan proses penerbitan SPD dikarenakan Anggaran pada Kas Daerah tidak tersedia sehingga proses penyerapan anggaran terlambat.

Upaya mengatasi permasalahan agar kedepannya penyerapan anggaran dan capaian kinerja lebih optimal dengan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Proses penyusunan Petunjuk Teknis dan Penetapan Penerima Manfaat harus dilakukan lebih awal dan terencana serta perlu dilakukan verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dan perlu Pendampingan dan Pengawasan pelaksanaan penyaluran Bansos agar tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Perlu Penganggaran dana untuk verifikasi dan validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Perlu ditingkatkan keakuratan perhitungan kebutuhan anggaran sehingga pada saat perubahan anggaran tidak lagi terjadi kelebihan / kekurangan penganggaran.
4. Mengoptimalkan konsultasi dan koordinasi dalam proses administrasi penatausahaan keuangan untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan administrasi dalam proses pencairan dana.

Sedangkan faktor-faktor penunjang dalam pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;

3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Adanya kegiatan Asistensi / Pendampingan dan Rekonsiliasi sehingga pelaporan dapat lebih akurat dan tepat waktu.

3.4 Dokumentasi Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2023

Gambar 3.1
Kegiatan Rehabilitasi Sosial







Gambar 3.2
Kegiatan Penanganan Bencana







Gambar 3.3
Kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial





Gambar 3.4
Kegiatan Pemberdayaan Sosial





BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi*
Peningkatan kinerja

4.1 Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Dari analisis sasaran dan indikator kinerja utama sebagai tolak ukur. Pada tahun 2023, indikator kinerja Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tertangani tercapai dengan jumlah 50.001 Jiwa dari target 2.663 Jiwa.
- 2) Sampai dengan Tahun 2023 capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial terealisasi sebanyak 50.001 jiwa atau 1.276% dari target sebanyak 2.633 jiwa. Terlampaui tingginya realisasi capaian kinerja tahun 2023 disebabkan oleh Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani meningkat sangat besar (target yang ditetapkan dalam Renstra terlalu rendah). Hal tersebut merupakan dampak inflasi kenaikan kebutuhan pokok dan kenaikan harga BBM yang menjadi salah satu faktor inflasi yang berpengaruh cukup besar. Kemudian yang tidak bisa di hindari kejadian bencana sosial yang bersifat insidentil yang mengakibatkan bertambahnya jumlah masyarakat yang menjadi korban kebencanaan (kebakaran / rumah rubuh / konflik sosial dan lainnya) yang mengakibatkan jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) menjadi meningkat pula.
- 3) Sedangkan untuk keberhasilan tercapainya kinerja tidak lepas dari meningkatnya pemahaman masyarakat akan kepedulian sosial, adanya media sosial dan jaringan online untuk layanan dan aduan dari masyarakat, yang

mendukung percepatan penanganan masalah sosial, menyebabkan respon pihak terkait bisa maksimal, serta meningkatnya kapasitas potensi sumber tenaga kesejahteraan sosial Kabupaten Seruyan di Kecamatan/Desa,

- 4) Tersedianya data PMKS dan PSKS terbaru untuk bahan penentuan sasaran, tersedianya lembaga kesejahteraan sosial terkait dalam mendukung pelaksanaan kegiatan serta kerja sama yang baik masyarakat dan pihak-pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan serta partisipasi yang besar dari PSKS di Kabupaten Seruyan untuk mendukung program kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dalam upaya penanganan PMKS dan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

4.2 Rekomendasi Peningkatan Kinerja

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Sistem Terpadu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dari pihak semua terkait, instrumen pendukung
- 2) Dukungan anggaran yang memadai agar pelaksanaan pelayanan sosial lebih maksimal
- 3) Peningkatan / pembinaan potensi untuk profesionalitas potensi sumber tenaga kesejahteraan sosial (PSKS) Kabupaten Seruyan, melalui koordinasi, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan
- 4) Peningkatan Sistem Pengendalian Intern agar resiko kegiatan pelayanan sosial dapat diminimalisir.

- 5) Memaksimalkan peran Tagana dan instansi pemerintah serta melibatkan masyarakat di daerah rawan bencana dalam hal penanganan bencana mulai dari pra, saat dan pasca terjadinya bencana.



Kuala Pembuang, 26 Februari 2024
Kepala Dinas Sosial,

ANGGA, SE

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680405 198703 1 001